

**PERAN ORGANISASI PEREMPUAN DALAM MERESPONS KRISIS  
PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH: STUDI KASUS FLOWER ACEH  
DAN *ACEH WOMEN'S FOR PEACE FOUNDATION***

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN OLEH :**

**FATHIYA ADDINI**

NIM. 190801065

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan**

**Program Studi Ilmu Politik**



**PRODI ILMU POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN PEMERINTAHAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**BANDA ACEH**

**2025 M/1446 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fathiya Addini  
NIM : 190801065  
Prodi : Ilmu Politik  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Peran Organisasi Perempuan Dalam Merespons Krisis  
Pengungsi Rohingya di Aceh : Studi Kasus Flower Aceh  
dan Aceh Women's For Peace Foundation.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebabkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Januari 2025

Yang Menyatakan,

   
Fathiya Addini

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERAN ORGANISASI PEREMPUAN DALAM MERESPON KRISIS  
PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH: STUDI KASUS FLOWER ACEH  
DAN ACEH WOMEN'S FOR PEACE FOUNDATION**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan  
Skripsi Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

**FATHIYA ADDINI**

NIM: 190801065

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Banda Aceh, 5 Januari 2025

Disetujui Untuk Disidangkan Oleh :


جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof. Dr. Phil. Saiful Akmal, M.A.  
NIP.198203012008011006

  
Melly Masni, M.A.R.  
NIP.1993305242020122016

**PERAN ORGANISASI PEREMPUAN DALAM MERESPONS KRISIS  
PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH: STUDI KASUS FLOWER ACEH  
DAN ACEH WOMEN'S FOR PEACE FOUNDATION**

**SKRIPSI**

**FATHIYA ADDINI**

190801065

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Poitik

Pada Hari Tanggal : Senin 13 Januari 2025 M

13 Rajab 1446 H

Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



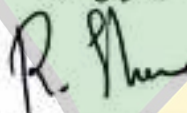
**Prof. Dr. Phil Saiful Akmal, M.A.**  
NIP.198203012008011006

Sekretaris



**Melly Masni, M.I.R.**  
NIP.1993305242020122016

Penguji I,



**Rizkika Lhena Darwin, M.A.**  
NIP.198812072018032001

Penguji II,



**Arif Akbar, M.A.**  
NIP. 199110242022031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.**  
NIP.197403271999031005



## ABSTRAK

Nama : Fathiya Addini  
Nim : 190801065  
Prodi : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Peran Organisasi Perempuan Dalam Merespons Krisis Pengungsi Rohingya Di Aceh: Studi Kasus Flower Aceh dan *Aceh Women's For Peace Foundation*  
Pembimbing I : Prof. Dr.phil.Saiful Akmal, M.A.  
Pembimbing II : Melly Masni, M.I.R.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana organisasi perempuan merespons krisis pengungsi Rohingya di Aceh, di tengah ramainya penolakan dari masyarakat. Penelitian ini juga mengeksplorasi sikap dan peran organisasi perempuan dalam membantu dan menangani pengungsi Rohingya di Aceh, serta mempelajari tantangan yang dihadapi oleh organisasi perempuan. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan wawancara secara mendalam dengan organisasi perempuan Flower Aceh dan *Aceh women's For Peace Foundation* (AWPF). Flower Aceh merupakan organisasi perempuan di Aceh yang memiliki fokus pada program pemberdayaan dan penguatan akar rumput di perdesaan miskin kota yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menolak diskriminasi dan anti kekerasan dalam penegakan hak perempuan. Sementara AWPF merupakan organisasi perempuan di Aceh yang memiliki konsen dalam mendorong penegakan hak-hak perempuan dan perdamaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam merespons krisis pengungsi Rohingya di Aceh, sikap dari organisasi perempuan di Aceh antara lain menunjukkan moralitas kepedulian, konsen terhadap kondisi perempuan dan anak, serta keprihatinan akan penyebaran hoaks dan dari penolakan masyarakat. Kemudian peran yang telah dilakukan oleh kedua organisasi perempuan di Aceh antara lain adalah turut mendistribusikan bantuan kemanusiaan, melakukan pendataan kebutuhan pengungsi, memberikan edukasi untuk masyarakat, serta mengadakan kalaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Adapun tantangan yang dihadapi oleh organisasi perempuan dalam merespon krisis pengungsi Rohingya antara lain, meliputi tantangan administrasi, adanya penolakan dari masyarakat, kebijakan pemerintah yang kurang akomodatif serta keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peningkatan partisipasi perempuan dan membantu penanganan pengungsi di masa depan.

**Kata Kunci** : Organisasi Perempuan, Flower Aceh, AWPF, Pengungsi Rohingya di Aceh

## KATA PENGANTAR



### ***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Dengan mengucapkan alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Organisasi Perempuan Dalam Merespons Krisis Pengungsi Rohingya Di Aceh: Studi Kasus Flower Aceh (FA) Dan *Aceh Women’s For Peace Foundation (AWPF)*” dengan baik. Shalawat beserta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Pada Kesempatan ini, penulis menyadari begitu banyak pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Skripsi ini dari awal hingga akhir. Penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Phil.Saiful Akmal, M.A. selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing serta meluangkan waktu, memberikan masukan dan saran yang memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Melly Masni, M.I.R. selaku pembimbing II yang telah membimbing serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Aklima, M.A. selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis dalam menentukan Judul dalam penulisan Skripsi, dan memotivasi penulis selama perkuliahan.
4. Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A, selaku Ketua Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-raniry Banda Aceh.

5. Bapak Dr.Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-raniry Banda Aceh.
6. Semua teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Politik Angkatan 2019, yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas 4 tahun bersama.
7. Seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga skripsi selesai yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Terima kasih paling tinggi penulis ucapkan kepada Ayah Anwar sudah menjadi ayah terbaik, ibu Putri Suryani yang menjadi ibu yang hebat untuk ke enam anak, kakak Desi Ariyanti, Delia Suraiya, Syifa Maisarah, Adik Yasmin, dan Ananda Aisyah yang telah sangat banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis tanpa kenal lelah. Kemudian terima kasih penulis ucapkan kepada keponakan Adam Suhaily Alkhalifi yang selalu memberikan keceriaan dan sumber kebahagiaan bagi penulis. Dan Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Ami atas curahan kasih sayang, doa, nasihat, motivasi, dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi.

Penulis berharap skripsi ini akan memberikan manfaat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Besar harapan penulis atas kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini akan lebih baik lagi.

Banda Aceh, 13 Januari 2025

Fathiya Addini

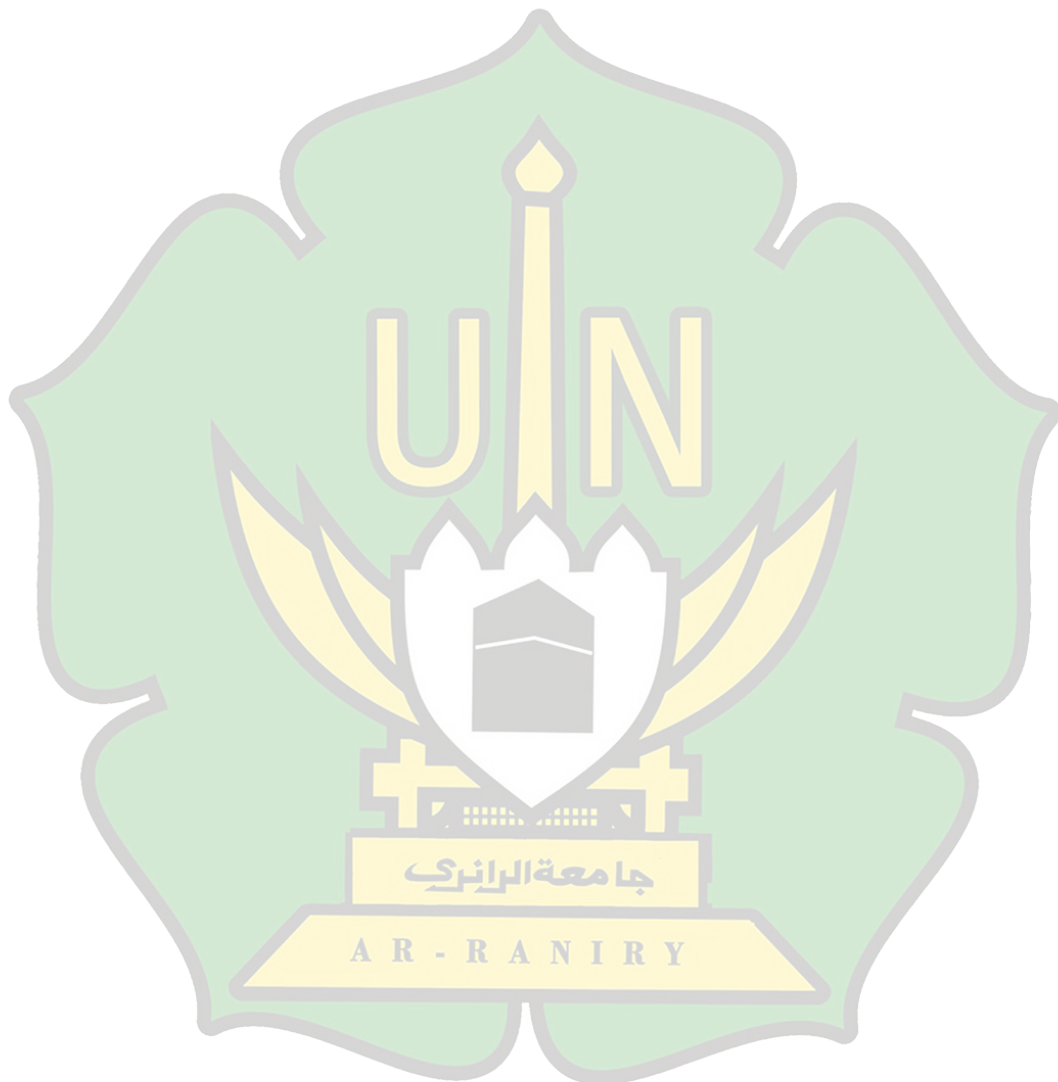
## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Landasan Teori.....	13
2.2.1 Teori Etika Kepedulian Feminis ( <i>Feminist Ethic of Care</i> ).....	13
2.2.1.1 Tahap Perkembangan Moral.....	17
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>19</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	19
3.2 Fokus Penelitian.....	19
3.2 Lokasi Penelitian.....	20
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	20
3.5.1 Data Primer.....	20
3.5.2 Data Sekunder.....	20
3.6 Informan Penelitian.....	21



3.7	Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.7.1	Wawancara.....	22
3.7.2	Dokumentasi.....	22
3.8	Teknis Analisis Data.....	23
3.8.1	Reduksi Data.....	23
3.8.2	Penyajian Data.....	23
3.8.3	Penarikan Kesimpulan.....	23
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>24</b>
4.1	Gambaran Umum Subjek Penelitian.....	24
4.1.1	Flower Aceh (FA).....	24
4.1.2	<i>Aceh Women's For Peace Foundation (AWPF)</i> .....	25
4.2	Sikap Organisasi Perempuan Dalam Merespons Krisis Pengungsi Rohingya di Aceh .....	27
4.2.1	Moralitas Kepedulian.....	27
4.2.2	Konsen terhadap kondisi perempuan dan anak.....	37
4.2.3	Keprihatinan Akan Penyebaran Hoaks dan Penolakan Masyarakat.....	40
4.3	Peran Organisasi Perempuan Dalam Merespons Krisis Pengungsi Rohingya di Aceh.....	47
4.3.1	Distribusi Bantuan Kemanusiaan.....	47
4.3.2	Pendataan Kebutuhan Pengungsi.....	49
4.3.3	Edukasi Untuk Masyarakat.....	51
4.3.4	Kalaborasi dan Kerjasama.....	53
4.4	Tantangan Organisasi Perempuan Dalam Merespons Krisis Pengungsi Rohingya di Aceh.....	56
4.4.1	Tantangan Administrasi.....	56
4.4.2	Penolakan Masyarakat.....	59
4.4.3	Kebijakan Pemerintah Yang Kurang Akomodatif.....	62
4.4.4	Keterbatasan Sumber Daya Manusia.....	63
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
5.1	Kesimpulan.....	66

5.2 Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh sejak 2012-2023.....	4
---	---



## DAFTAR TABEL

3.1 Tabel Data Jumlah Informan Penelitian.....	28
--	----





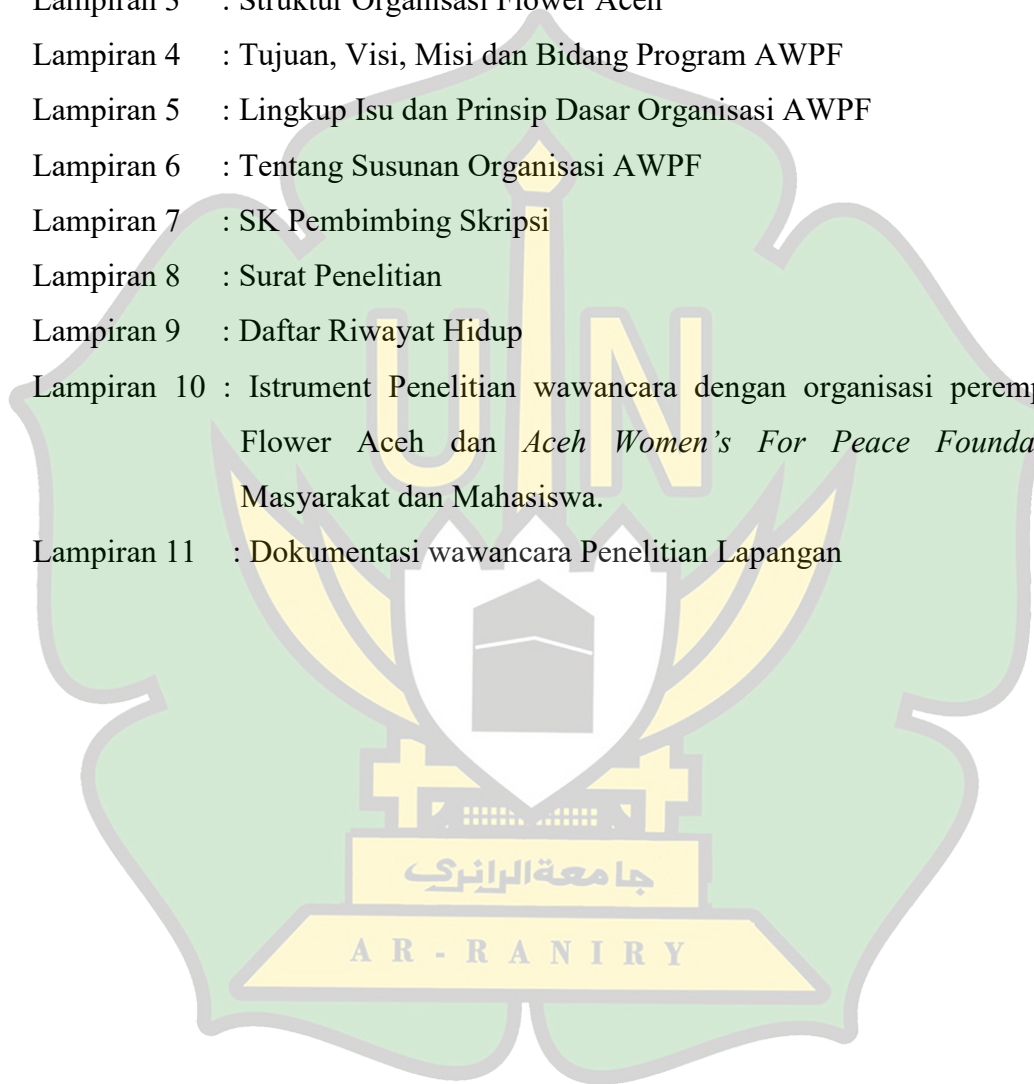
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Pemindahan Secara Paksa Pengungsi Rohingya oleh Mahasiswa...	53
Gambar 4.2 Penyerahan Bantuan Kepada Pengungsi Perempuan dan Anak- Anak di BMA.....	55
Gambar 4.3 Assement Pendataan Bersama Dengan Pengungsi Perempuan Rohingya.....	57



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Tujuan Flower Aceh
- Lampiran 2 : Tugas, Fungsi dan Kegiatan Utama Flower Aceh
- Lampiran 3 : Struktur Organisasi Flower Aceh
- Lampiran 4 : Tujuan, Visi, Misi dan Bidang Program AWPf
- Lampiran 5 : Lingkup Isu dan Prinsip Dasar Organisasi AWPf
- Lampiran 6 : Tentang Susunan Organisasi AWPf
- Lampiran 7 : SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 8 : Surat Penelitian
- Lampiran 9 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 10 : Instrumen Penelitian wawancara dengan organisasi perempuan Flower Aceh dan *Aceh Women's For Peace Foundation*, Masyarakat dan Mahasiswa.
- Lampiran 11 : Dokumentasi wawancara Penelitian Lapangan



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke.<sup>1</sup> Negara ini memiliki posisi geografis yang sangat strategis, terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra (Hindia dan Pasifik). Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai jalur pelayaran internasional yang sangat penting, baik untuk perdagangan maupun migrasi manusia. Salah satu bentuk migrasi yang sering melibatkan wilayah perairan Indonesia adalah arus pengungsi lintas negara, termasuk pengungsi Rohingya yang menggunakan jalur laut untuk melarikan diri dari penindasan di negara asal mereka, Myanmar.

Etnis Rohingya, kelompok minoritas Muslim di Myanmar, telah lama mengalami perlakuan diskriminatif, penganiayaan, serta kekerasan oleh pemerintah dan mayoritas etnis Buddha Rakhine. Sejak Myanmar merdeka, Rohingya tidak diakui sebagai warga negara sah oleh pemerintah Myanmar, dan kondisi ini semakin diperburuk oleh kebijakan-kebijakan diskriminatif yang diterapkan terhadap mereka. Penindasan ini telah memaksa ribuan, bahkan jutaan orang Rohingya untuk meninggalkan tanah air mereka dan mencari perlindungan di negara-negara tetangga, termasuk Bangladesh, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Aceh, sebagai salah satu wilayah yang terletak di jalur perairan Selat Malaka, menjadi titik penting dalam perjalanan para pengungsi Rohingya.<sup>2</sup>

Meskipun Indonesia belum menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 yang merupakan dasar hukum internasional bagi perlindungan pengungsi, Indonesia tetap memiliki kewajiban moral dan kemanusiaan untuk

---

<sup>1</sup>Hardi Alunaza S.D. “*Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015*”. Universitas Tanjungpura. Vol,2 No.1 januari-juni 2017. Hal. 1.

<sup>2</sup> Dr.Drs. Budi Budaya, M.Pd, S.H. “*Dampak kewarganegaraan etnis Rohingya di Myanmar terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan negara sekitar*”. Universitas Wisnuwardhana Malang. Vol.11,No.1, Mei 2017 hal 106-120.

membantu pengungsi lintas negara.<sup>3</sup> Ini sesuai dengan semangat Pancasila, khususnya sila kedua yang menekankan “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” serta prinsip-prinsip dalam UUD 1945, terutama di bagian pembukaan yang memuat pernyataan bahwa bangsa Indonesia turut serta dalam “menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Oleh karena itu, Indonesia tidak bisa menutup mata terhadap penderitaan para pengungsi Rohingya yang tiba di wilayahnya, meskipun negara ini belum memiliki kerangka hukum nasional yang jelas untuk menangani status pengungsi.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan negara terbesar di ASEAN, Indonesia telah memainkan peran penting dalam membantu menangani krisis Rohingya. Pemerintah Indonesia tidak hanya terlibat dalam memberikan bantuan kemanusiaan, tetapi juga berperan dalam upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik di Myanmar.<sup>4</sup> Salah satu upaya diplomatik yang dilakukan Indonesia adalah melalui kerja sama dengan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Indonesia telah membuka lobi-lobi dengan negara-negara anggota OKI untuk mendapatkan dukungan dalam menyelesaikan konflik Rohingya secara damai. Diplomasi ini mencerminkan solidaritas keagamaan dan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dan keadilan di kawasan Asia Tenggara.<sup>5</sup>

Namun, di balik upaya diplomatik tersebut, tantangan nyata terjadi di lapangan, terutama di wilayah-wilayah seperti Aceh yang menjadi tempat pendaratan pertama para pengungsi. Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh dimulai sejak tahun 2012, ketika gelombang pertama pengungsi tiba di perairan Indonesia. Kedatangan ini pada awalnya disambut dengan tangan terbuka oleh masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh, yang memiliki sejarah panjang solidaritas kemanusiaan dan penerimaan terhadap orang-orang yang membutuhkan

---

<sup>3</sup> Wagiman, *Hukum pengungsi internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.52.

<sup>4</sup> Nabila Ainayah, Debora Neira (2021) “Peran Indonesia Dalam Membantu Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya” Universitas Paramadina Jakarta Selatan.

<sup>5</sup> Muhammad Ichsan, *Aksara Jurnal Pendidikan nonformal*, volume 07(02) Mei 2021, Universitas Indonesia.



perlindungan, menunjukkan sikap yang sangat berbeda dari negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara yang cenderung menolak kedatangan pengungsi.<sup>6</sup>

Pada tahap awal, masyarakat Aceh menerima kedatangan para pengungsi Rohingya dengan sikap terbuka dan penuh kepedulian. Ketika negara-negara lain menolak pengungsi dengan alasan kedaulatan negara dan kekhawatiran keamanan, Aceh menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan lebih penting. Penyelamatan para pengungsi Rohingya dilakukan oleh nelayan-nelayan Aceh yang dengan spontan dan penuh keberanian membantu mereka yang terapung-apung di laut. Para nelayan Aceh, tanpa mengindahkan perintah TNI AL yang awalnya menolak kedatangan para pengungsi, memutuskan untuk menjemput mereka dari laut dan membawa mereka ke daratan Aceh.<sup>7</sup>

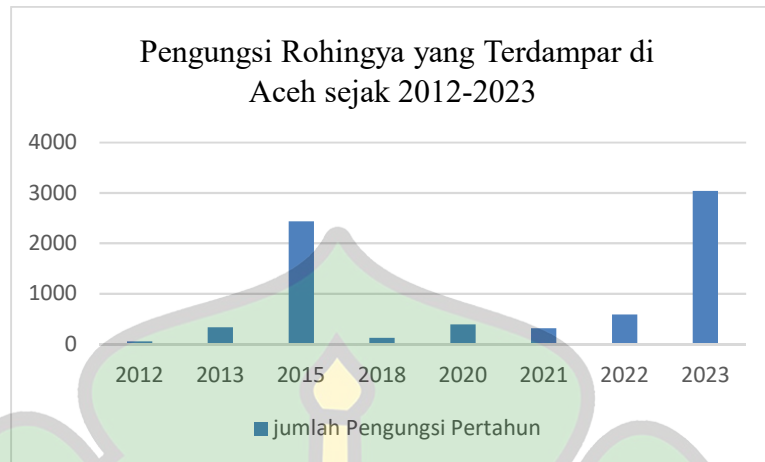
Sikap masyarakat Aceh ini didasarkan pada rasa kemanusiaan yang mendalam. Melihat kondisi pengungsi yang sangat memprihatinkan, banyak di antara mereka yang mengalami dehidrasi, kelaparan, dan kelelahan setelah berhari-hari terombang-ambing di laut. masyarakat Aceh tidak bisa tinggal diam. Pengungsi yang terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak diselamatkan oleh nelayan-nelayan dari berbagai wilayah di Aceh, termasuk Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Langsa. Pemerintah Aceh juga turut memberikan dukungan dengan menyediakan tempat penampungan sementara (*temporary shelter*) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kuala Cangko, serta di Pelabuhan Kuala Langsa.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> <https://theconversation.com/ditolak-di-berbagai-tempat-mengapa-pengungsi-rohingya-diterima-dengan-tangan-terbuka-di-aceh-145033>

<sup>7</sup> [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/05/150518\\_Nelayan\\_Aceh\\_PetuhPerintah\\_TNI\\_Terkait\\_Pengungsi\\_indonesia\\_](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150518_Nelayan_Aceh_PetuhPerintah_TNI_Terkait_Pengungsi_indonesia_)

<sup>8</sup> Heri Aryanto, *Rohingya: Sejarah, Penderitaan, Dan Kedatangannya Di Indonesia*. Hlm.56.

## 1.1 Grafik pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh sejak 2012-2023



Sumber: (Sayuti, 2024)

Sejak tahun 2012 hingga sekarang, para pengungsi Rohingya terus berdatangan ke Aceh melalui jalur laut. Bagi para pengungsi, mendarat di perairan Aceh menjadi akhir dari penderitaan panjang mereka. Meskipun demikian, seiring berjalannya waktu, tantangan dalam menangani pengungsi mulai muncul, baik dari sisi logistik maupun dinamika sosial di masyarakat Aceh. Meskipun pada awalnya masyarakat Aceh menerima para pengungsi dengan tangan terbuka, situasi mulai berubah seiring dengan berjalannya waktu.<sup>9</sup> Pada tahun 2023 dan 2024, terjadi peningkatan penolakan dari masyarakat Aceh terhadap pengungsi Rohingya. Beberapa insiden yang melibatkan pengungsi, seperti aksi protes dengan membuang bantuan warga ke laut, pelarian tanpa izin dari kamp penampungan, serta pelanggaran norma dan adat setempat, telah memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Pengalaman buruk ini menyebabkan munculnya sentimen negatif terhadap para pengungsi.<sup>10</sup>

Berdasarkan data dari UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*), hingga Desember 2023, tercatat 1.543 pengungsi telah mendarat di

<sup>9</sup> Ahmad Sayuti. 2024. Analisis Framing Pemberitaan Isu Rohingya di Media CNN dan AJNN. Skripsi. Hal: 71. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

<sup>10</sup> <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7074619/4-kelakukan-buruk-pengungsi-rohingya-aceh-buang-bantuan-kabur-dari-kamp>.

Aceh.<sup>11</sup> Namun, berbeda dengan penerimaan sebelumnya, beberapa wilayah seperti Bireuen mengalami penolakan oleh warga setempat terhadap kedatangan pengungsi. Aksi protes dan pengusiran yang dilakukan oleh mahasiswa di Banda Aceh pada Desember 2023 semakin memperburuk situasi. Pengusiran paksa ini dilakukan terhadap pengungsi yang ditempatkan di Gedung Balai Meuseuraya Aceh (BMA), dengan melibatkan pengusiran anak-anak dan wanita yang ketakutan.

Tidak hanya di Banda Aceh, aksi serupa juga terjadi di Aceh Barat pada Maret 2024, di mana warga setempat menolak kedatangan 69 pengungsi Rohingya yang akan ditempatkan di bekas kompleks rumah sakit jiwa milik pemerintah.<sup>12</sup> Aksi penolakan ini disertai dengan demonstrasi warga yang menolak kehadiran pengungsi di desa mereka, dengan alasan kekhawatiran akan keamanan dan stabilitas sosial. Pada awal November 2024 pengungsi Rohingya kembali terdampar di perairan Aceh, tepatnya di Aceh Selatan yang belum diizinkan ke daratan karena mendapat penolakan dari masyarakat setempat, masyarakat menolak kehadiran pengungsi untuk mengantisipasi agar kejadian yang tidak diinginkan terjadi lagi setelah kedatangan mereka di Aceh. Akhirnya para aparat dan masyarakat memindahkan pengungsi Rohingya dengan menggunakan 5 truk menuju Banda Aceh tepatnya di kantor Kemenkum HAM dan kantor Gubernur Aceh. Kedua instansi ini tidak membuka ruang akses untuk menerima kedatangan pengungsi Rohingya yang membuat resahnya warga, sehingga pengungsi Rohingnya mendapat penolakan oleh warga jeulingke dan pada akhirnya mereka dipulangkan kembali ke Aceh Selatan<sup>13</sup>.

Penolakan terhadap pengungsi Rohingya di berbagai wilayah Aceh membawa dampak serius, baik bagi citra Aceh di tingkat nasional maupun internasional. Aceh, yang selama ini dikenal sebagai daerah yang menjunjung

---

<sup>11</sup> Chairussani Abbas Sopamena. Pengungsi Rohingya Dan Potensi Konflik&Kemajemukan Horizontal Di Aceh. Caraka Prabu: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.No.2 . Hal 87 Desember (2023), Universitas Jenderal Achmad Yani.

<sup>12</sup> Reni Susanti. Tolak Pengungsi Rohingya Warga Aceh Barat. <https://Regional.Kompas.Com/Read/2024/03/22/074745678/Tolak-Pengungsi>.

<sup>13</sup> <https://liks.suara.com/read/2024/11/11/172150/di-balik-jeruji-truk-kisah-pilu-pengungsi-rohingya-yang-ditolak-di-Aceh>.

tinggi nilai-nilai Syariat Islam dan kemanusiaan, kini berada dalam sorotan negatif karena tindakan kekerasan dan pengusiran terhadap pengungsi. Kondisi ini memicu keprihatinan dari aktivis hak asasi manusia dan pengamat internasional, serta menimbulkan citra buruk bagi Indonesia, terutama di kalangan masyarakat global yang peduli terhadap hak-hak pengungsi.<sup>14</sup>

Selain itu, perubahan sikap masyarakat Aceh dari sentimen positif menjadi negatif juga dipengaruhi oleh tersebarnya berita-berita hoaks yang mencoreng citra pengungsi. Beberapa laporan mengenai tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum pengungsi, termasuk pelecehan seksual terhadap relawan Indonesia, turut memperburuk situasi.<sup>15</sup> Hal ini semakin memperkuat keyakinan masyarakat Aceh untuk menolak kehadiran pengungsi di wilayah mereka.<sup>16</sup>

Dalam konteks krisis pengungsi Rohingya di Aceh, peran organisasi perempuan menjadi sangat penting. Organisasi-organisasi perempuan seperti Flower Aceh (FA), Aceh Women's For Peace Foundation (AWPF) telah berperan aktif dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak pengungsi. Mereka juga menjadi agen perubahan dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan sosial di tengah krisis kemanusiaan ini.<sup>17</sup>

Sebelas organisasi perempuan di Aceh telah bersatu mengemban aksi kekerasan dan pengusiran yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap para pengungsi Rohingya. Organisasi-organisasi ini, termasuk Presidium Balai Syura Ureng Inong Aceh (BSUIA), Flower Aceh, Serikat Inong Aceh, Komunitas Solidaritas Perempuan Aceh, Yayasan Pulih Aceh, *Aceh Women's for Peace Foundation (AWPF)*, LBH Apik Aceh, Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RpUK), Wakil Komisi Kesetaraan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Pengurus Sekolah HAM Perempuan Flower Aceh, dan LSM Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MiSPI), menyuarakan keprihatinan mereka atas

---

<sup>14</sup> Haidari Khansa. 2024. Penolakan Pengungsi Rohingya Di Aceh: Peran Moral Foundation Terhadap Sikap Penolakan Masyarakat Aceh. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.11, No.1

<sup>15</sup> Caraka Prabu. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* "Pengungsi Rohingya Dan Potensi Konflik Dan Kemajemukan Horizontal Di Aceh" Vol. 7.No.2 Desember 2023.

<sup>16</sup> <https://iainlangsa.ac.id> "Dosen IAIN Langsa Sampaikan Respon Masyarakat Aceh Terhadap Pengungsi Rohingya."

<sup>17</sup> <http://balaisyura.com/2024/01/17/11-organisasi-perempuan-aceh-dalam-kontek-krisis-pengungsi-rohingya-sesalkan-pengusiran-pengungsi-rohingya-oleh-mahasiswa/>



penanganan pengungsi Rohingya yang tidak manusiawi.<sup>18</sup> Mereka menekankan bahwa pengungsi, khususnya perempuan dan anak-anak, adalah korban kekerasan dan perdagangan manusia yang membutuhkan perlindungan khusus.

Organisasi perempuan tersebut menegaskan bahwa pemerintah, baik di tingkat lokal maupun nasional, harus bertanggung jawab untuk memastikan keamanan, kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak dasar para pengungsi. Mereka juga menyerukan agar universitas yang mahasiswanya terlibat dalam aksi anarkis terhadap pengungsi Rohingya bertanggung jawab atas tindakan mereka yang memperburuk upaya penanganan krisis ini.<sup>19</sup>

Di antara organisasi-organisasi tersebut, Flower Aceh dan *Aceh Women's for Peace Foundation* berperan penting dalam menyuarakan keprihatinan mereka atas penanganan pengungsi Rohingya. Flower Aceh (FA) telah berupaya dalam melakukan gerakan untuk mencegah, dan memberikan respon terkait pelanggaran HAM. Organisasi ini telah melakukan kegiatan berupa sosialisasi dan edukasi pencegahan terkait *Gender Based Violence (GBV)*, menyusun *referral system* atau SOP untuk penanganan kasus GBV di tempat pengungsi Rohingya yang bertujuan untuk memerangi penyelamatan manusia berbasis gender. Selain itu, Flower Aceh juga melakukan pembinaan dan kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat setempat.<sup>20</sup> Organisasi lainnya yang terlibat adalah *Aceh Women's For Peace Wondation (AWPF)* juga terlibat aktif dalam upaya menangani pengungsi Rohingya, dengan memberikan perlindungan dan bantuan logistik khususnya kepada perempuan dan anak-anak. Bantuan logistik yang diberikan berupa *personal hygiene* seperti celana dalam, baju dalam dan pembalut untuk perempuan. *personal hygiene* ini merupakan suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Kemudian memberikan bantuan layanan kesehatan kepada ibu hamil, menyusui dan memberikan bantuan makanan bergizi berupa buah-buahan kepada anak-anak

---

<sup>18</sup> Yarmen Dinamika. <https://Aceh.Tribunnews.Com>. "11 Organisasi Perempuan Aceh Sesalkan Pengusiran Pengungsi Rohingya Oleh Mahasiswa."

<sup>19</sup> <https://tirta.id/kenapa-pengungsi-rohingya-di-aceh-diusir-paksa-mahasiswa-gTPf>

<sup>20</sup> Alliya Nurfitriya, Faqesysha Nabilla Irvi dkk., "Mengatasi Gender-Based Violence: pendekatan UNHCR di kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh". Jurnal ilmu pendidikan, politik dan Sosial Indonesia universitas veteran jakarta. Vol.1 no.3 juli 2024.

balita.<sup>21</sup> Jadi alasan pemilihan kedua organisasi perempuan ini karena sama-sama konsen terhadap isu pengungsi.

Partisipasi organisasi perempuan ini sangat penting, karena perempuan sering kali menjadi kelompok yang paling rentan dalam situasi konflik. Organisasi-organisasi ini tidak hanya berfokus pada bantuan kemanusiaan, tetapi juga pada advokasi hak-hak perempuan dan anak-anak, serta mendorong integrasi pendekatan gender dalam penanganan pengungsi Rohingya. Mereka memperjuangkan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta pemenuhan hak-hak dasar bagi para pengungsi, khususnya kepada perempuan dan anak-anak.

Dalam konteks yang lebih luas, keterlibatan organisasi perempuan dalam menangani krisis pengungsi Rohingya di Aceh mencerminkan pentingnya peran perempuan sebagai agen perubahan dalam situasi kemanusiaan. Perempuan, baik sebagai ibu rumah tangga maupun aktivis, memiliki kemampuan unik untuk membangun jembatan empati dan solidaritas di tengah-tengah krisis. Melalui kerja keras dan dedikasi mereka, organisasi perempuan di Aceh berperan penting dalam melindungi hak-hak pengungsi dan memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan tetap terjaga di tengah-tengah tantangan yang ada.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pertanyaan masalah untuk dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sikap organisasi perempuan dalam merespons krisis pengungsi Rohingya di Aceh ?
2. Bagaimana peran organisasi perempuan dalam memberikan bantuan dan perlindungan bagi pengungsi Rohingya di Aceh ?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh organisasi perempuan dalam merespons krisis pengungsi Rohingya di Aceh ?

---

<sup>21</sup> [Http://Balaisyura.Com/2024/01/17/11-Organisasi-Perempuan-Aceh-Sesalkan-Pengusiran-Pengungsi-Rohingya- Oleh-Mahasiswa/](http://Balaisyura.Com/2024/01/17/11-Organisasi-Perempuan-Aceh-Sesalkan-Pengusiran-Pengungsi-Rohingya- Oleh-Mahasiswa/).

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

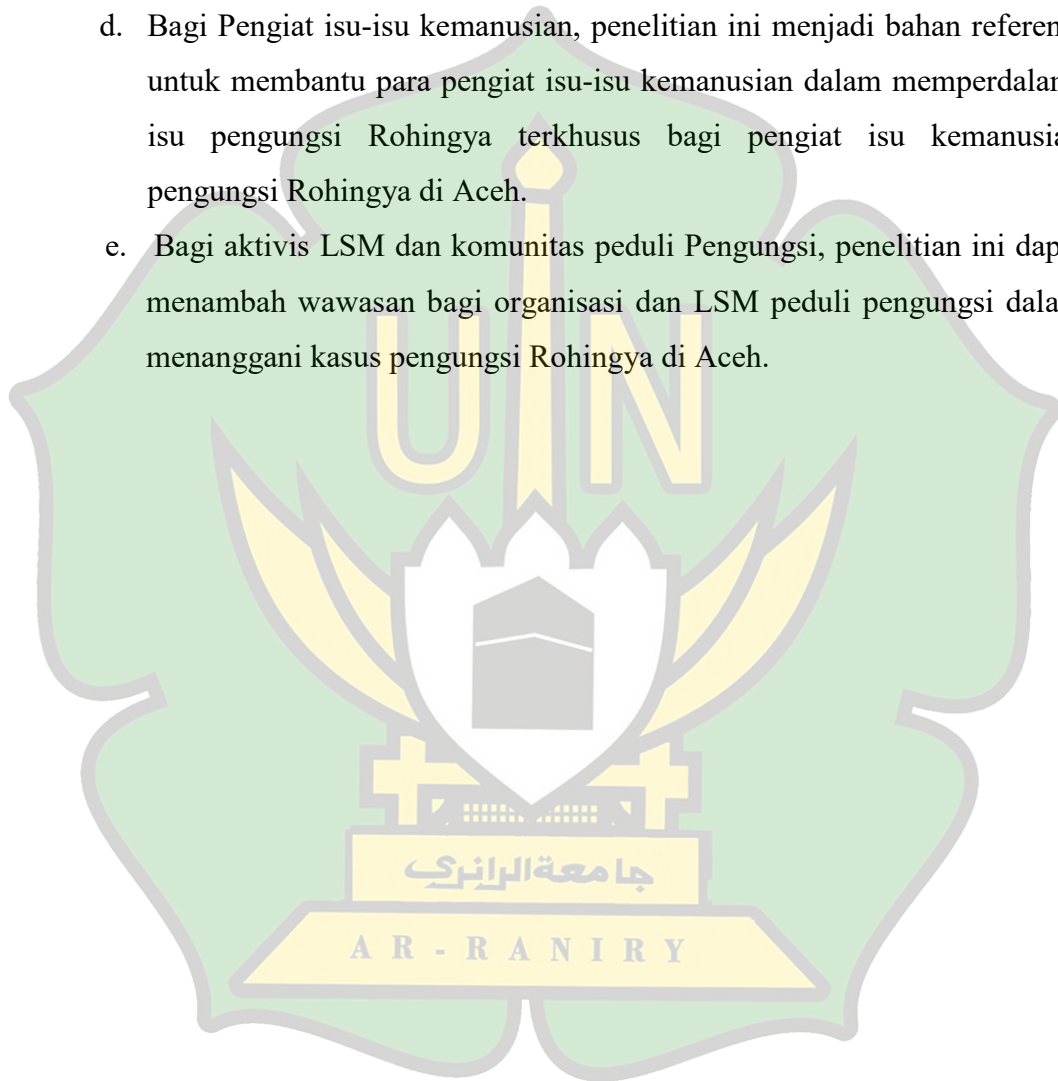
1. Untuk mengetahui sikap organisasi perempuan dalam merespons krisis pengungsi Rohingya di Aceh.
2. Untuk mengeksplorasi peran organisasi perempuan dalam memberikan bantuan dan perlindungan bagi pengungsi Rohingya di Aceh
3. Untuk mempelajari tantangan yang dihadapi oleh organisasi perempuan dalam merespon krisis pengungsi Rohingya di Aceh

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang peran organisasi perempuan dalam merespons krisis pengungsi Rohingnya di Aceh: studi Flower Aceh (FA) dan *Aceh Women's For Peace Foundation* (AWPF).
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dijadikan referensi tentang peran organisasi perempuan dalam merespons krisis pengungsi Rohingya di Aceh: studi kasus Flower Aceh (FA) dan *Aceh Women's For Peace Foundation* (AWPF).
  - a. Bagi Dosen, penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan dan bahan evaluasi bagi dosen dalam mengembangkan pembelajaran yang terampil, efektif dan efisien khususnya pada Prodi Ilmu Politik Fakultas Fisip Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
  - b. Bagi Mahasiswa dan Prodi, penelitian ini dapat memberikan informasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya kepada mahasiswa prodi Ilmu Politik, agar mengetahui “Peran Organisasi Perempuan Dalam Merespon Krisis Pengungsi Rohingya di Aceh: Studi Kasus Flower Aceh (FA) dan *Aceh Women's Peace Fondation* (AWPF)”.

- c. Bagi akademis, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sendiri, yaitu untuk mengembangkan kemampuan berfikir dan mengasah kemampuan membuat karya ilmiah dalam menyelesaikan strata satu (S-1) pada Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- d. Bagi Pegiat isu-isu kemanusiaan, penelitian ini menjadi bahan referensi untuk membantu para pegiat isu-isu kemanusiaan dalam memperdalam isu pengungsi Rohingya terkhusus bagi pegiat isu kemanusiaan pengungsi Rohingya di Aceh.
- e. Bagi aktivis LSM dan komunitas peduli Pengungsi, penelitian ini dapat menambah wawasan bagi organisasi dan LSM peduli pengungsi dalam menangani kasus pengungsi Rohingya di Aceh.





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan peninjauan kembali sumber-sumber kepustakaan yang terkait (*review of related literature*) dengan tujuan memperdalam pemahaman terkait permasalahan yang diteliti. Manfaat dari tinjauan pustaka adalah untuk menyediakan dasar teoritis dan informasi yang mendukung penelitian. Tinjauan pustaka ini mencakup dua aspek utama: (1) Kajian Pustaka, mencakup penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, dan (2) Landasan Teori, yang menyediakan teori-teori untuk mendukung dan memperkuat analisis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Etika Kepedulian Feminis (*Feminist Ethics of Care*) yang dikemukakan oleh Carol Gilligan.

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merujuk pada penelusuran literatur yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kajian ini berguna sebagai referensi untuk menentukan langkah-langkah penelitian yang tepat. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik dan pembahasan yang berkaitan dengan pemberitaan dinamika pengungsi Rohingya di Aceh, sudah ada sejak dulu. Beberapa studi-studi terdahulu ini antara lain :

Penelitian pertama skripsi yang di tulis Sayuti yang berjudul, “Analisis Framing Pemberitaan Isu Rohingya di Media CNN dan AJNN”. Metode yang digunakan untuk melihat framing dalam penelitian ini menjelaskan isu penolakan masyarakat Aceh terhadap Rohingya akan menjadi bumerang bagi Aceh sendiri, mengingat Aceh punya rekam jejak yang dibantu oleh berbagai negara saat bencana tsunami. Pasca aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa Aceh baik media CNN maupun AJNN sangat aktif memberitakan isu Rohingya, mengingat berita merupakan hasil kontruksi oleh media menurut sudut pandang meliputi visi dan misi, ideologi atau kepentingan pemilik media itu sendiri dalam hal idealis maupun bisnis. Tentunya ini tidak baik bagi Aceh sendiri jika media-

media memfreming pemberitaan Rohingya yang tidak sesuai dengan realita sebenarnya.<sup>22</sup>

Penelitian kedua adalah Akmal dan Masni, dalam buku yang berjudul, “Duka Pengungsi Rohingya: catatan kaum stateless people Myanmar.” Dalam buku ini peneliti menjelaskan bahwa, krisis kemanusiaan di Myanmar telah menyebabkan lebih dari satu juta masyarakat minoritas Rohingya hidup dalam ketakutan, diskriminasi, dan penindasan. Sebagai langkah kecil kepedulian kepada mereka yang terusir dari kampung halamannya, diperlukan kolaborasi antara elemen masyarakat seperti akademisi, jurnalis, hingga sastrawan, perlu terlibat dalam menyuarkan krisis yang terjadi di Myanmar sehingga mampu meminimalisir tingginya masyarakat sipil menjadi korban penindasan. Dengan adanya kolaborasi ini akan mengetuk hati nurani dan melihat kembali pada apa yang terjadi di Myanmar selama ini sehingga terwujudnya perdamaian dan penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM di Myanmar. Dalam buku ini peneliti juga menjelaskan permasalahan kontra yang di hadapi para pengungsi Rohingya, dimana sejak 2015 ketika rakyat Aceh mengulurkan tangan kepada pengungsi Rohingya namun pada akhir 2023 segelintir mahasiswa dan masyarakat mengusir mereka.<sup>23</sup>

Penelitian ketiga dalam buku yang berjudul, “Aceh Muliakan Rohingya”. Yang digagas oleh lembaga kemanusiaan yayasan geutanyoe memuat kisah kemanusiaan warga dan relawan yang membantu pengungsi Rohingya saat terdampar di Aceh. Dengan hadirnya studi dalam buku ini bisa merawat kisah kemanusiaan warga dan relawan di Aceh yang menolong pengungsi Rohingya, dan menjadi suatu kehormatan dan sejarah panjang bagi Aceh, dimana Aceh sudah lama menolong pengungsi Luar negeri, tetapi selama ini hanya menjadi cerita dari mulut ke mulut karena tidak terdokumentasi dengan baik. Sehingga

---

<sup>22</sup> Ahmad Sayuti” Analisis Framing Pemberitahuan Isu Rohingya Di Media CNN dan AJJN” . Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

<sup>23</sup> Saiful, Masni, Dalam buku “Duka Pengungsi Rohingya Catatan Kaum Stateless People Myanmar”

cerita ini tidak menjadi dogeng, dengan adanya studi dalam buku ini menjadi paham edukasi dan pembelajaran bagi Aceh ke depan.<sup>24</sup>

Penelitian keempat skripsi Fhalda yang berjudul “Dinamika Penanganan Pengungsi Rohingya oleh Lembaga Internasional: Studi Kasus UNHCR dan IOM di Lhokseumawe Tahun 2020-2022”. Dalam studi ini berfokus pada bagaimana lembaga internasional menangani pengungsi Rohingya di Lhokseumawe, dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNHCR dan IOM memberikan perlindungan internasional, bantuan kemanusiaan, layanan kesehatan, serta pendidikan kepada para pengungsi. Dalam aspek sosial, mereka menjalin kerja sama untuk menyediakan tempat tinggal sementara, mendukung pendidikan anak-anak, dan mempromosikan inklusi sosial. Di bidang kesehatan, akses layanan medis diberikan melalui rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya, serta dukungan psikososial melalui konseling dan rehabilitasi fisik dan mental.<sup>25</sup>

Dari penelitian-penelitian di atas, terdapat beberapa kesamaan dengan yang peneliti lakukan, terutama dalam hal metode penelitian kualitatif, jenis data, dan analisis data. Namun berdasarkan permasalahan yang ada, fokus penelitian ini berbeda karena menitikberatkan pada “Peran Organisasi Perempuan Dalam Merespon Krisis Pengungsi Rohingnya di Aceh : Studi Kasus Flower Aceh (FA) dan *Aceh Women’s For Peace Fondation (AWPF)*.”

## **2.2 Landasan Teoritis**

### **2.2.1 Teori Etika Kepedulian Feminis (*Feminist Ethics of Care*)**

Etika merupakan nilai-nilai moral yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam menjalankan berbagai tindakan dan program. Etika juga mencerminkan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan sosial dan hubungan antar individu dalam suatu komunitas. Dalam kerangka feminisme, *Ethics of Care* atau etika kepedulian diperkenalkan sebagai sebuah pendekatan etika yang lebih

<sup>24</sup> <https://arpus.acehprov.go.id>. “Peluncuran Buku Aceh Muliakan Rohingya”.

<sup>25</sup> Arif Fhalda, “Dinamika Penanganan Pengungsi Rohingya Oleh Lembaga Internasional Studi Kasus UNHCR dan IOM Lhokseumawe Tahun 2020-2022”. Srikpsi Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan Uin Ar-Raniry Banda Aceh, thn 2023

menekankan pada hubungan sosial yang penuh empati, simpati, dan tanggung jawab terhadap sesama. Pendekatan ini dianggap sebagai etika yang khas perempuan dan menjadi tandingan dari etika keadilan yang lebih berfokus pada aspek kewajiban dan aturan yang seringkali dianggap lebih “maskulin” (Arivia, 2003:278).<sup>26</sup>

Salah satu tokoh penting dalam pengembangan etika kepedulian adalah Carol Gilligan, seorang psikolog feminis yang lahir pada 28 November 1936 di New York, Amerika Serikat. Gilligan dikenal luas atas kritiknya terhadap teori moralitas Lawrence Kohlberg, yang dinilai bias gender karena menempatkan perempuan pada tahap perkembangan moral yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Gilligan, dalam karyanya *In a Different Voice* (1982), memperkenalkan konsep *ethics of care* sebagai sebuah pendekatan etika yang lebih sesuai untuk memahami pengalaman perempuan dalam konteks hubungan antar individu.<sup>27</sup> Gilligan beranggapan bahwa teori ini dapat dijadikan alternatif dari teori Kohlberg yang lebih menyorotkan keadilan di dalamnya.

Gilligan berargumen bahwa perempuan lebih cenderung mengedepankan empati dan hubungan sosial dari pada penegakan keadilan yang didasarkan pada aturan dan prinsip-prinsip yang kaku. Menurut Gilligan, moralitas kepedulian adalah karakteristik perempuan yang unik.<sup>28</sup> Di mana kepedulian terhadap sesama menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan. Ini berbeda dengan pendekatan moralitas laki-laki yang cenderung mengutamakan hak-hak individu dan prinsip keadilan.

Dalam konteks krisis pengungsi Rohingya di Aceh, teori *Ethics of Care* sangat relevan karena menekankan pentingnya hubungan sosial, empati, dan tanggung jawab kolektif dalam merespons krisis kemanusiaan. Organisasi-organisasi perempuan seperti AWPf dan Flower Aceh, yang terlibat langsung

---

<sup>26</sup> Hastanti Widy Nugroho, “Paradoks Gender Kajian Feminisme Etis” *Jurnal Filsafat* Vol,18,Nomor 3, Desember 2008. Hlm 305.

<sup>27</sup> Khoirunnisa Mi’rojiah. 2012. *Ethics of Care dalam Pendidikan: Sebuah Analisa Filosofis atas Pemikiran Nel Noddings*. Hal 44.

<sup>28</sup> Septiana Dwiputri Maharani, Abstrak dalam Skripsi (*Konsep Etika Kepedulian Carol Gilligan Dalam Persepektif Filsafat Manusia dan Relevansinya bagi Pemahaman Hubungan Antargender Di Inonesia*), Universitas Gadjah Mada 2015.



dalam membantu pengungsi Rohingya, menggunakan pendekatan etika kepedulian ini dalam tindakan mereka. Mereka tidak hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek emosional dan sosial dari para pengungsi, terutama perempuan dan anak-anak, yang sering kali menjadi kelompok yang paling rentan dalam situasi konflik.

Etika kepedulian ini tercermin dalam tindakan konkret organisasi perempuan yang melibatkan diri secara langsung dalam memberikan perlindungan, pendampingan psikososial, serta dukungan dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Mereka menempatkan diri sebagai pendengar aktif, yang siap merespons kebutuhan mendesak para pengungsi dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya mereka.

Gilligan mengkritik model moralitas Kohlberg yang lebih berfokus pada keadilan, dengan menempatkan perempuan pada tahap moral yang lebih rendah karena perempuan dinilai kurang mampu mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip abstrak keadilan. Menurut Gilligan, perempuan cenderung membuat keputusan moral berdasarkan hubungan interpersonal dan kepedulian terhadap orang lain, bukan semata-mata berdasarkan aturan yang kaku.<sup>29</sup> Dalam hal ini, perempuan menilai diri mereka sendiri dalam konteks hubungan dengan orang lain dan takut akan pemisahan dari hubungan sosial tersebut.<sup>30</sup>

Gilligan merumuskan perbedaan pandangan bagi pendekatan laki-laki dan perempuan terhadap penalaran moralitas.

1. Pendekatan laki-laki terhadap moralitas adalah bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar tertentu dan kita harus saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain tersebut. Jadi, moralitas memiliki pembatasan pada apa yang akan dilakukan. Gilligan menyebutnya sebagai "*justice orientation*".
2. Pendekatan perempuan terhadap moralitas adalah bahwa seseorang memiliki tanggung jawab terhadap orang lain. Jadi, moralitas bagi perempuan memiliki

---

<sup>29</sup> Carrol G, in a *Difrent Voice. Psychological Theory and Women's Development* (Cambridge: Harverd University,2013)'hlm.62.

<sup>30</sup> <https://Eprints.Uny.Ac.Id/22882/4/BAB%20II.Pdf>



keharusan atau kewajiban untuk peduli terhadap orang lain. Gilligan menyebutnya “*responsible orientation*”.<sup>31</sup>

Dalam situasi krisis pengungsi Rohingya, perempuan di Aceh, khususnya yang terlibat dalam organisasi-organisasi perempuan, memainkan peran penting dalam mengimplementasikan etika kepedulian ini. Mereka tidak hanya melihat pengungsi sebagai individu yang membutuhkan bantuan, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas yang perlu dijaga kehormatannya dan dilindungi hak-haknya. Sikap empati dan tanggung jawab sosial ini mendorong mereka untuk melibatkan diri secara aktif dalam upaya perlindungan pengungsi, meskipun menghadapi tantangan-tantangan besar.

Seperti halnya teori lain, etika kepedulian Gilligan juga tidak lepas dari kritik. Salah satu kritik utama terhadap teori ini adalah dikotomi antara kepedulian (yang diasosiasikan dengan perempuan) dan keadilan (yang diasosiasikan dengan laki-laki). Hayles (1986) berpendapat bahwa Gilligan terlalu menyederhanakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal moralitas, sehingga terkesan menguatkan stereotip gender.<sup>32</sup> Blum (1988) juga mengkritik bahwa moralitas kepedulian tidak bisa dipisahkan sepenuhnya dari hak dan keadilan, karena dalam banyak situasi, kepedulian moral juga membutuhkan prinsip-prinsip keadilan yang kuat.<sup>33</sup>

Meskipun demikian, dalam konteks krisis pengungsi Rohingya, etika kepedulian justru memperkuat upaya-upaya kemanusiaan yang dilakukan oleh organisasi perempuan di Aceh. Sebagai contoh, Flower Aceh (FA) dan Aceh *Women's for Peace Fondation* (AWPF) tidak hanya fokus pada bantuan materi, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada kondisi psikososial para pengungsi. Mereka memfasilitasi interaksi yang lebih mendalam dengan para pengungsi, mendengarkan cerita mereka, dan mencoba memahami kebutuhan emosional mereka. Pendekatan ini sangat berbeda dengan penanganan yang lebih formal dan

---

<sup>31</sup> Khoirunnisa Mi'rojiah. 2012. *Ethics of Care dalam Pendidikan: Sebuah Analisa Filosofis atas Pemikiran Nel Noddings*. Hal.45.

<sup>32</sup> <https://id.scribd.com/document/403150006>.” Konsep Etika Kepedulian Carol Gillingan Dalam Persepektif Filsafat Manusia Relevansinya”.

<sup>33</sup> <https://id.scribd.com/document/403150006>.” Konsep Etika Kepedulian Carol Gillingan Dalam Persepektif Filsafat Manusia Relevansinya”.

birokratis yang sering kali dilakukan oleh organisasi internasional atau pemerintah, yang mungkin lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan fisik semata.

### **2.2.1.1 Tahapan Perkembangan Moral**

Gilligan juga memperkenalkan tiga tahapan perkembangan moral yang berbeda dengan teori Kohlberg.<sup>34</sup> Tahapan-tahapan ini menggambarkan bagaimana perempuan mengambil keputusan moral berdasarkan kepedulian terhadap diri sendiri dan orang lain:

#### **1. Tahap Pra-Konvensional**

Pada tahap ini, perempuan lebih fokus pada kepentingan pribadi dan kelangsungan hidup diri sendiri. Mereka cenderung memilih tindakan yang paling bermanfaat bagi diri mereka sendiri, sering kali tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain.

#### **2. Tahap Konvensional**

Pada tahap ini, perempuan mulai memperhatikan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain. Mereka merasa bertanggung jawab untuk membantu orang lain, meskipun kadang-kadang hal ini berarti mengorbankan kepentingan pribadi. Moralitas pada tahap ini sering kali dilihat sebagai pengorbanan diri demi kebaikan orang lain.

#### **3. Tahap Pasca-Konvensional**

Pada tahap ini, perempuan mencapai keseimbangan antara kepedulian terhadap diri sendiri dan kepedulian terhadap orang lain. Mereka memahami bahwa kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain bisa saling terkait dan bahwa kepedulian yang mendalam terhadap orang lain tidak harus mengorbankan kebutuhan diri sendiri.

Dalam konteks penelitian ini, tahapan perkembangan moral tersebut dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana organisasi perempuan di Aceh, seperti Flower Aceh dan AWPf mengambil keputusan moral dalam merespons krisis

---

<sup>34</sup> <https://id.scribd.com/document/562705556/> Tahapan perkembangan Moral Carol-Gilligan.

pengungsi Rohingya. Pada tahap awal, mungkin fokus mereka adalah memberikan bantuan mendesak dan sosialisasi kepada para pengungsi, namun seiring waktu, mereka juga mulai mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan mereka, baik bagi komunitas lokal maupun bagi para pengungsi itu sendiri.

Dalam penelitian ini, teori *Ethics of Care* sangat relevan untuk memahami bagaimana organisasi perempuan di Aceh merespons krisis pengungsi Rohingya. Organisasi seperti Flower Aceh dan AWPf tidak hanya berfokus pada bantuan material, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan emosional dari pengungsi, terutama perempuan dan anak-anak. Mereka berusaha menciptakan ruang yang aman dan mendukung bagi pengungsi, di mana kepedulian dan perhatian terhadap sesama menjadi prioritas utama.

Selain itu, teori ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi tantangan yang dihadapi oleh organisasi perempuan dalam menjalankan tugas mereka. Meskipun mereka berusaha mengedepankan kepedulian, mereka sering kali harus menghadapi tekanan dari masyarakat lokal yang mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang kehadiran pengungsi. Di sinilah etika kepedulian diuji, karena mereka harus menavigasi konflik antara kepentingan lokal dan kepentingan pengungsi, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip kemanusiaan yang mereka junjung.<sup>35</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, fokus saya kepada peran Organisasi perempuan dalam merespons krisis pengungsi Rohingya di Aceh: Studi Kasus Flower Aceh dan *Aceh Women's For Peace Foundation*.

---

<sup>35</sup> <https://Study.Com/Academy/Lesson/Carol-Gilligans-Theory-Of-Moral-Development.Html>.

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang atau subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik seperti pada penelitian kuantitatif.<sup>36</sup> Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial dan pengalaman subjektif. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif dipilih karena relevan untuk mengeksplorasi sikap, persepsi, dan peran organisasi perempuan dalam merespons krisis pengungsi Rohingya di Aceh. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa, fenomena, dan persepsi subjek penelitian secara rinci, dengan fokus pada interaksi sosial yang terjadi.

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui “Peran Organisasi Perempuan dalam Merespons Krisis Pengungsi Rohingya di Aceh: Studi Kasus Flower Aceh dan AWPF”. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang mendeskripsikan fenomena, peristiwa, atau keadaan dengan menggunakan data kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan secara komprehensif berdasarkan fakta yang ada.

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah pada Peran Organisasi Perempuan dalam Merespons Krisis Pengungsi Rohingya di Aceh, dengan studi kasus pada Flower Aceh dan *Aceh Women's For Peace Foundation* (AWPF). Pemilihan organisasi ini karena kedua organisasi perempuan ini fokus dalam memberikan perlindungan, bantuan kemanusiaan, dan advokasi kepada pengungsi Rohingya, khususnya

---

<sup>36</sup> Rulan Ahmadi. 2016. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

perempuan dan anak-anak. Fokus penelitian mencakup sikap organisasi terhadap krisis ini, peran yang dilakukan, serta tantangan yang dihadapi dalam menangani isu-isu pengungsi.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di dua organisasi perempuan, Flower Aceh yang berlokasi di Jln. Kebun raja, Gampong Pineung, kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh 24412. *Aceh Women's For Peace Foundation* (AWPF), berlokasi di Jln. Belibis jl. Kamboja No.14A, Ateuk Pahlawan, Kecamatan, Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23127. Kedua organisasi ini berperan signifikan dalam merespons krisis pengungsi Rohingya di wilayah Aceh, dan lokasinya dipilih karena merupakan pusat kegiatan advokasi dan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi.

### **3.4 Jenis dan sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek yang dapat memberikan informasi terkait fenomena yang diteliti.<sup>37</sup> Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### **3.4.1 Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Data primer ini mencakup pandangan dan pengalaman para informan terkait peran dan sikap organisasi perempuan dalam merespons krisis pengungsi Rohingya. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi langsung di lapangan, baik di Flower Aceh (FA) maupun *Aceh Women's For Peace Fondation* (AWPF).

#### **3.4.2 Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, laporan, serta penelitian terdahulu yang relevan. Data ini digunakan untuk memberikan kerangka teoritis dan latar belakang yang lebih luas dalam penelitian.

---

<sup>37</sup> Eri Barlian. 2016, *Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press.



Sumber data sekunder mencakup literatur yang membahas organisasi perempuan, krisis pengungsi, kebijakan terkait pengungsi Rohingya di Indonesia, serta aktivitas advokasi kemanusiaan.

### 3.5 Informan Penelitian

Sparley menjelaskan bahwa informan yang dipilih haruslah sesuai yaitu seseorang yang benar-benar memahami kultur atau situasi yang ingin diteliti untuk memberikan informasi kepada peneliti.<sup>38</sup> Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian serta teknik *expert sampling* dengan memilih individu yang memiliki keahlian khusus dan pengetahuan tinggi mengenai tentang suatu objek tertentu. Dengan Informan penelitian terdiri dari individu-individu yang memiliki keterlibatan langsung dalam organisasi Flower Aceh dan AWPF, serta masyarakat yang terlibat dalam penanganan pengungsi Rohingya. Kriteria informan yang dipilih antara lain:

- a. Anggota aktif Flower Aceh dan AWPF yang telah terlibat minimal selama lima tahun dalam kegiatan organisasi.
- b. Pengambil keputusan di dalam organisasi yang memahami program-program terkait pengungsi Rohingya.
- c. Masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan bantuan kemanusiaan dan advokasi pengungsi.

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No.	Informan	Jumlah
1.	Staf advokasi, divisi Pemberdayaan Masyarakat, Flower Aceh (FA)	1 Orang
2.	Staf Koordinasi lapangan, devisi Pemberdayaan Masyarakat, Flower Aceh (FA)	1 Orang
3.	Direktur Aceh <i>Women's For Peace Foundation</i> (AWPF).	1 Orang
4.	Staf Program, <i>Aceh Women's For Peac Foundation</i> (AWPF).	1 Orang

<sup>38</sup> Salim dan Syahrums. 2012. *Metodolgi Penelitian Kualitatif* Konsep dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan. Bandung: Citapustaka Media.

5.	Staf Administrasi dan Keuangan, <i>Aceh Women's For Peace Fondation (AWPF)</i> .	1 Orang
6.	Masyarakat Kota Banda Aceh	2 Orang
<b>Total</b>		<b>7 Orang</b>

Sumber: Olah data primer

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>39</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan dua metode utama:

#### 3.6.1 Wawancara

Teknik wawancara, merupakan teknik penggalan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih.<sup>40</sup> Wawancara mendalam dilakukan terhadap kedua organisasi, yakni Flower dan AWPF, serta beberapa masyarakat yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai sikap, peran, dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi perempuan dalam merespons krisis pengungsi Rohingya.

#### 3.6.2 Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln, dokumentasi dalam penelitian kualitatif adalah setiap bahan tertulis ataupun film yang dapat digunakan sebagai pendukung bukti penelitian.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan kegiatan, arsip, publikasi, dan dokumentasi foto dari aktivitas yang dilakukan oleh Flower Aceh dan AWPF. Selain itu, dokumentasi juga melibatkan pengumpulan data dari buku, jurnal, artikel, serta laporan media yang berhubungan dengan krisis pengungsi Rohingya.

<sup>39</sup> Farida Nugrahani. 2014., *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia*, Surakarta.

<sup>40</sup> Farida Nugrahani.2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia*. Surakarta.

<sup>41</sup> Farida Nugrahani.2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia*. Surakarta.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, peneliti akan menganalisis data menggunakan pendekatan yang diuraikan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan:

42

#### 3.7.1 Reduksi Data

Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumentasi akan direduksi atau dipilih untuk menghilangkan data yang tidak relevan dengan fokus penelitian. Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mengarahkan data ke topik yang lebih fokus, yaitu peran organisasi perempuan dalam menangani krisis pengungsi Rohingya.

#### 3.7.2 Penyajian Data

Setelah data direduksi, data yang relevan akan disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi dan grafik yang memudahkan peneliti untuk memahaminya. Penyajian data ini bertujuan untuk mengorganisasikan data yang telah dikumpulkan agar lebih mudah dianalisis secara mendalam.

#### 3.7.3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data disajikan, peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan temuan dari data yang dianalisis. Kesimpulan awal yang diambil akan bersifat sementara dan dapat berubah apabila ditemukan bukti-bukti tambahan selama proses penelitian. Kesimpulan akhir diharapkan dapat memberikan jawaban yang komprehensif terhadap pertanyaan penelitian.

---

<sup>42</sup> Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan Tindakan*.(Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm,22.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian**

##### **4.1.1 Flower Aceh (FA)**

Flower Aceh merupakan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki fokus pada program pemberdayaan dan penguatan perempuan akar rumput di perdesaan dan miskin kota yang berspektif gender. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena beberapa alasan, yang pertama karena Flower Aceh termasuk kedalam salah satu organisasi di Aceh yang berpartisipasi dalam menangani krisis pengungsi Rohingya di Aceh. Selain itu juga karena Flower Aceh termasuk organisasi perempuan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta organisasi ini memiliki visi dalam menghargai keberagaman, menolak diskriminasi dan anti kekerasan. Hal inilah yang menyebabkan saya tertarik untuk menggali lebih dalam lagi terkait Flower Aceh ini.

Flower Aceh berdiri pada tanggal 23 September 1989 oleh beberapa aktivis perempuan seperti Suraiya Kamaruzaman, ST, Dra. Hijriati dan Jawarah, S.Pd. Pada awalnya Flower Aceh melakukan pendampingan pemberdayaan ekonomi perempuan desa yang berada disekitar kampus Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, dengan alokasi dana dari uang pribadi tanpa bantuan dari pihak manapun. Kemudian setelah 7 tahun Flower Aceh menyebar ke beberapa desa rawan konflik Daerah Operasi Militer (DOM) seperti di Kabupaten Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Besar untuk melakukan pemberdayaan pendampingan dan pelatihan *trauma healing* di berbagai daerah terjadinya konflik secara tersembunyi, dan menjangkau wilayah Aceh Barat dan Aceh Jaya ketika terjadinya penanganan dampak bencana Alam Tsunami Aceh.

Bencana Tsunami Aceh 26 Desember 2004 membawa pengaruh besar bagi perjalanan program Flower Aceh. Pada saat itu banyak organisasi dituntut harus mampu bergerak cepat dalam penanganan terhadap korban Tsunami. Salah satunya Organisasi Flower Aceh dipercaya oleh banyak lembaga dana luar negeri untuk mengelola dana dan sumbangan yang cukup besar untuk membantu

pemulihan kehidupan terutama perempuan dan anak serta keluarga korban bencana. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2009 Flower Aceh mengubah bentuk Organisasi dari badan hukum yayasan menjadi perkumpulan.

Flower Aceh terbentuk karena melihat banyaknya persoalan serta permasalahan yang kerap dialami perempuan, seperti pelanggaran dan kekerasan terjadi pada perempuan dan anak sebagai akibat tidak adanya sistem dan peraturan pemerintah serta hukum yang tidak berpihak pada kepentingan perempuan. Karena berdasarkan dari segi kehidupan sosial peran perempuan masih dibatasi sebagai pengaruh kuatnya budaya patriarki dan pandangan *stereotype* di Aceh dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan realita dan situasi di atas Flower Aceh sebagai organisasi non pemerintahan yang beranggotakan perempuan dan laki-laki memiliki kepedulian dan komitmen pada pembelaan dan penegakan hak-hak perempuan dan anak yang tertindas serta berupaya mewujudkan tatanan kehidupan yang menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi perempuan. Visi Flower Aceh yaitu untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, adil dalam pola relasi perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, menghargai keberagaman, menolak diskriminasi dan anti kekerasan.

Untuk mengetahui informasi lebih mendalam tentang organisasi perempuan Flower Aceh, dapat dilihat pada bagian lampiran 1,2 dan 3.

#### **4.1.2 Aceh Women's For Peace Fondation (AWPF)**

Lokasi penelitian selanjutnya yaitu di *Aceh Women's For Peace Fondation* (AWPF). AWPF adalah salah satu organisasi perempuan yang turut membantu penanganan pengungsi Rohingya.

AWPF atau yayasan perempuan untuk perdamaian, merupakan organisasi non pemerintahan (*Non Government Organization*) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) sipil di provinsi Aceh yang berdiri pada tanggal 28 April 2009 yang memiliki *konsen* dalam mendorong penegakan hak-hak perempuan dan membangun perdamaian. AWPF didirikan sebagai respon atas



keprihatinan beberapa aktivis perempuan terhadap berbagai bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan yang terus terjadi pasca konflik di Aceh.

Latar belakang pendirian AWPf, diawali melalui respon aktif beberapa aktivis perempuan atas keprihatinannya melihat berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan, yang terus terjadi pasca konflik di Aceh, Indonesia. Saat itu, berbagai bentuk pelanggaran moral, agama, dan kemanusiaan di masa transisi Aceh terhadap perempuan, telah memberikan hambatan bagi proses penegakan hak asasi perempuan, maupun proses panjang mewujudkan perdamaian Aceh yang lebih permanen.

Dalam konteks inilah, maka mereka bersepakat dan berinisiatif untuk mendirikan AWPf sebagai sebuah kendaraan bagi perempuan, yang secara fokus akan memperhatikan, menganalisa dan berbuat untuk memperjuangkan kepentingan dan posisi perempuan yang termarginalkan, yang kondisinya dapat dikatakan lebih rentan apabila dibandingkan ketika Aceh dalam situasi konflik. Kerentanan perempuan tersebut, dapat dilihat dengan jelas pada berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan yang kian meningkat polanya, bahkan dalam beberapa kasus, tindak kekerasan terhadap perempuan di masa transisi justru memperoleh legitimasi, apakah atas nama agama, adat istiadat maupun hukum yang berlaku.

Eksisnya kompleksitas permasalahan dan tantangan yang berbeda pada perempuan Aceh di masa transisi tersebut, telah mendorong AWPf untuk bersikap aktif mengambil peran dalam melahirkan ide dan inisiatif baru yang lebih segar, solutif dan memperhatikan muatan lokal, agar hasilnya dapat berguna dan memberi manfaat secara berkelanjutan dalam mendorong percepatan terselenggaranya Penegakan Hak Azasi Perempuan, maupun perdamaian yang lebih hakiki, khususnya di Aceh. Untuk merealisasikannya, maka AWPf bekerja bersama kelompok perempuan akar rumput dan organisasi masyarakat sipil di Aceh yang koncern pada issue yang sama.

Untuk mengetahui informasi lebih mendalam terkait organisasi perempuan *AWPF*, dapat dilihat pada bagian lampiran 4,5 dan 6.

## **4.2 Sikap Organisasi Perempuan dalam Merespon Krisis Pengungsi Rohingya di Aceh**

### **4.2.1 Moralitas Kepedulian**

Di tengah ramainya penolakan yang ditunjukkan oleh masyarakat dan mahasiswa. Organisasi perempuan seperti Flower Aceh dan AWPf justru menunjukkan empati terhadap kondisi pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh. Dalam menyikapi krisis ini, organisasi perempuan menunjukkan sikap yang lebih bersahabat kepada pengungsi Rohingya. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, sikap empati ini didasarkan pada rasa kemanusiaan yang bersumber dari beberapa aspek yaitu:

#### **1. Etika Khas Perempuan**

Menurut Gillingan, perempuan cenderung menggunakan etika yang lebih menekankan pada hubungan sosial yang penuh empati, simpati, dan tanggung jawab terhadap sesama. Hal ini dianggap sebagai etika khas perempuan, pengasuhan dan perawatan. Begitu pula dengan kepedulian kepada pengungsi Rohingya, yang diperlihatkan oleh anggota organisasi perempuan seperti Flower Aceh dan AWPf merupakan panggilan hati atas inisiatif mereka sebagai perempuan yang selalu mengedepankan etika khas perempuan. Sehingga menimbulkan dorongan untuk saling menolong dan berempati yang tinggi terhadap penderitaan orang lain. Selain itu, hal ini juga muncul dari kemampuan mengidentifikasi situasi dan kondisi apabila diri sendiri berada di posisi orang lain. Sependapat dengan pandangan Gilligan tentang bagaimana perempuan cenderung bisa merasakan penderitaan orang lain. Kepedulian terhadap pengungsi Rohingya khususnya terhadap perempuan dan anak merupakan panggilan kemanusiaan yang berasal dari diri sendiri dan harus dilakukan sesama manusia sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan.

Sebagai bagian dari panggilan kemanusiaan, dalam menangani krisis kemanusiaan terhadap pengungsi Rohingya, terdapat cerita penderitaan dan kepedihan yang membangkitkan rasa emosional, empati dan simpati dari diri masyarakat dan menjadi tanggung jawab bersama dalam menghadapi perjalanan yang penuh resiko dan kondisi hidup yang sulit yang dialami oleh

pengungsi Rohingya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh ibu Meutya Safrida, Staf AWPf divisi asistent administrasi dan keuangan yaitu:

*“Menurut saya dalam memaknai konteks kepedulian dalam membantu pengungsi Rohingya, sebenarnya konteks kepedulian itu memang harus ada dari jiwa seseorang, bukan dari organisasi tetapi memang dari hati seseorang. Dan ketika kami menjalankan progam ini, ada beberapa staf kita yang tidak setuju dengan membantu Rohingya. Namun kita terus berdiskusi hingga akhirnya kami mengambil keputusan untuk peduli terhadap sesama manusia dengan mengedepankan nilai kemanusiaan, karena nilai kemanusiaan lahir dari dalam diri seseorang”.*<sup>43</sup>

Sementara berdasarkan wawancara dengan ibu Gebrina Rezeky sebagai staff advokasi dari divisi Pemberdayaan Masyarakat di Flower Aceh, yaitu:

*“Kepedulian kepada pengungsi Rohingya merupakan panggilan kemanusiaan yang berasal dari diri sendiri dan harus dilakukan sesama manusia. Apalagi terhadap pengungsi perempuan dan anak-anak itu memang harus dikedepankan”.*<sup>44</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa kepedulian kedua organisasi perempuan disebabkan karena faktor kemanusiaanya yang muncul dari etika khas perempuan yang memiliki kepedulian terhadap sesama dalam hal ini kedua organisasi perempuan ini telah menunjukkan sikap empatinya terhadap pengungsi Rohingya khususnya terhadap perempuan dan anak-anak. Kondisi menyedihkan yang dialami para muslim Rohingya menyentuh sisi kemanusiaan setiap individu.

## 2. Mandat Lembaga

Krisis pengungsi Rohingya di Aceh mencerminkan masalah kemanusiaan yang serius dan membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Dalam perspektif kemanusiaan, aksi pengusiran Rohingya di Gedung BMA di Banda Aceh pada tanggal 27 Desember 2023 oleh ratusan demostran adalah

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Meutya Syafrida, Staf Aceh Women’s For Peace Fondation (AWPF), Divisi Asistent Administrasi dan Keuangan. Pada tanggal 29 November 2024.

<sup>44</sup> Hasil Wawancara Dengan Geubrina Rezeky, Sebagai Staff Advokasi Dari Divisi Pemberdayaan Masyarakat Flower Aceh (FA), Pada Tanggal 20 November 2024.

tindakan brutal yang tidak dapat dibenarkan. Sikap ini sangat berlawanan dengan kearifan dan nilai-nilai luhur yang selama ini dipegang kuat oleh masyarakat Aceh. Hal ini tentunya juga mencoreng citra baik dan nilai-nilai yang sudah ditanamkan di suatu lembaga.

Dalam menangani krisis pengungsi Rohingya, organisasi perempuan di Aceh telah berkontribusi dalam menangani kedatangan pengungsi Rohingya ini. Hal ini tidak terlepas dari mandat kedua organisasi ini yang memang menitikberatkan pada isu kemanusiaan. Dalam merespons hal ini, direktur AWPf, Ibu Irmasari SH.i menyampaikan bahwa:

*“Prinsip-prinsip kita terapkan dalam merespons krisis pengungsi Rohingya ini adalah kemanusiaan dan tidak diskriminasi. Jadi nilai-nilai seperti ini memang sudah kita tanamkan sejak lama di lembaga AWPf ini. Sehingga nilai-nilai ini juga harus kita implementasikan kepada pengungsi Rohingya yang hadir di Aceh”*.<sup>45</sup>

Selain itu, hal yang sama juga di sampaikan oleh Ibu Siti Almutarina, selaku koordinasi lapangan divisi pemberdayaan masyarakat, Flower Aceh yaitu:

*“Selama ini Flower Aceh itu fokusnya dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan anti kekerasan. Ketika kami melihat banyaknya persoalan yang kerap dialami oleh pengungsi Rohingya khususnya perempuan, apalagi beredarnya isu dijualnya pengungsi Rohingya yang perempuan tergeraklah kami untuk membantu mereka. Karena Flower Aceh itu organisasi yang memiliki mandat untuk kepedulian dan komitmen pada pembelaan dan penegakan hak-hak perempuan dan anak yang tertindas serta berupaya mewujudkan kehidupan yang menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi perempuan. Hal itulah yang menjadikan kami terjun dalam membantu mereka”*.<sup>46</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kepedulian dan kemanusiaan terhadap pengungsi Rohingya berasal dari mandat lembaga

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Irma Sari SH.i, Direktur Aceh Women's For Peace Foundation (AWPF), Pada tanggal 29 November 2024.

<sup>46</sup> Hasil Wawancara Dengan Siti Almutarina, selaku Koordinasi Lapangan Divisi Pemberdayaan Masyarakat Flower Aceh (FA), Pada Tanggal 20 November 2024.



telah diembankan oleh kedua organisasi perempuan seperti Flower Aceh dan AWPf. Hal ini dapat dilihat dari adanya nilai-nilai kepedulian sosial dari kedua organisasi ini yang di tunjukkan dalam bentuk pengabdian, tolong menolong, kesetiaan dan kepedulian mereka dalam membantu sesama. Nilai yang sudah ditanamkan dalam lembaga ini tentunya membuat kedua organisasi perempuan lebih peduli terhadap penderitaan orang lain. Sikap peduli yang diberikan kepada orang lain dapat menjadi contoh keteladanan baik, yang dapat mempengaruhi pola pikir orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama. Sehingga nilai-nilai kepedulian dan kemanusiaan ini sudah ditanamkan sejak lama di lembaga AWPf yang harus di implementasikan kepada pengungsi Rohingya yang hadir di Aceh. Dan ini dilakukan sesuai dengan visi, misi kedua organisasi perempuan Flower Aceh dan AWPf.

### 3. Pengalaman konflik GAM dan Tsunami Aceh

Pengalaman menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan pembelajaran bagi manusia kedepannya. Dengan pengalaman, seseorang dapat memetik pelajaran dari peristiwa yang pernah dialami pada masa lalu. Melalui pengalaman juga, rasa kepedulian dan kemanusiaan lebih berpotensi untuk muncul karena telah mengalami kesulitan dan kepedihan yang serupa.

Kepedulian dan kemanusiaan terhadap pengungsi Rohingya juga dirasakan oleh para anggota organisasi perempuan yang didasari oleh pengalaman Tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 dan konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Masyarakat Aceh telah mengalami konflik dan bencana alam, sehingga hal ini akan mempengaruhi bagaimana masyarakat Aceh memandang diri mereka maupun orang lain. Pada tahun 1976-2005 masyarakat Aceh melalui GAM telah melawan pemerintahan Indonesia dalam sebuah konflik sipil berkepanjangan untuk menuntut kemerdekaan. Selama konflik ini, telah banyak memakan korban jiwa dan banyak warga Aceh yang terpaksa mengungsi. Beberapa diantaranya bahkan mencari suaka di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia. Konflik Aceh selama bertahun-tahun menyisakan banyak trauma bagi masyarakat Aceh.



Kemudian setelah konflik yang berlangsung lama, masyarakat Aceh menghadapi bencana besar, tepat pada 26 Desember 2004. Aceh mengalami bencana Tsunami yang menyebabkan kerusakan dan memakan korban jiwa dengan skala yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Bencana ini menyebabkan kedatangan ribuan relawan asing yang turut membantu dalam upaya rekonstruksi. Tsunami Aceh menjadikan gerakan untuk perdamaian yang dilakukan dengan finalisasi melalui perdamaian kesepakatan Helsinki pada tanggal 15 Agustus

2005. Dari peristiwa ini, masyarakat Aceh merasakan bagaimana seluruh dunia berempati kepada Aceh dan mereka berbondong-bondong datang ke Aceh untuk memberikan bantuan dengan jumlah yang besar baik bantuan material, bantuan fisik dan psikis hingga Aceh kembali bangkit seperti sekarang. Malah jauh lebih banyak kemajuan dibandingkan sebelum musibah terjadi. Hal ini sebagaimana pendapat yang di kemukakan oleh ibu Irmasari, SH.i selaku Direktur AWPf bahwa:

*“Masyarakat Aceh secara jelas masih mengingat dan masih terus berdampak oleh konflik sipil dan kejadian tsunami. Sebenarnya dalam penanganan kepada pengungsi Rohingya itu tugas negara, bukan tugas warga negara. Negara harus mengambil alih tugas ini sehingga mampu memanusiakan pengungsi Rohingya dengan memberikan tempat serta makanan yang layak. Karena kita masyarakat Aceh juga pernah menjadi pengungsi ketika terjadinya konflik DOM Aceh tahun 1998 di tanah kita sendiri. Dari pengalaman itu kita tahu bagaimana rasanya jadi pengungsi dan hidup kesusahan. Sehingga kita tidak tega melihat pengungsi Rohingya ini”.*<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa kepedulian terhadap pengungsi Rohingya berasal dari pengalaman konflik GAM dan Tsunami Aceh yang dilakukan oleh organisasi perempuan, telah menunjukkan sikap positif mereka dalam merespons krisis pengungsi Rohingya di Aceh. Hal ini

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara Dengan Irmasari SH.i, selaku Direktur Aceh Women’s For Peace Fondation (AWPF). Pada Tanggal 29 November 2024.

dapat dilihat dari kepedulian dan pengalaman ketika terjadi konflik GAM dan Tsunami Aceh. Masyarakat Aceh ditolong oleh banyak relawan kemanusiaan asing dalam memberikan bantuan. Pengalaman tersebut telah menyentuhnya sisi kemanusiaan organisasi perempuan seperti Flower Aceh dan AWPf dalam membantu merespons krisis pengungsi Rohingya di Aceh, karena mengingat Aceh juga pernah di tolong oleh negara lain.

Pengalaman kelam yang dimiliki oleh masyarakat Aceh pada awalnya juga menjadi dasar Masyarakat Aceh menerima pengungsi Rohingya, karena masyarakat Aceh juga telah merasakan pengalaman konflik sebelumnya.<sup>48</sup> Kehidupan pengungsi Rohingya berada dalam posisi rentan. Mereka tidak tahu masa depan mereka seperti apa sehingga menyebabkan mereka berpindah-pindah menjadi pengungsi.

#### 4. Nilai-nilai keagamaan

Kepedulian sosial merupakan aspek penting dalam ajaran Islam yang menekankan nilai kemanusiaan. Dalam Islam, kemanusiaan dipahami sebagai penghormatan terhadap martabat manusia dan pemenuhan hak asasi manusia. Dengan memahami konsep ini, umat Islam diajak aktif menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Dengan senantiasa memberikan pertolongan kepada sesama manusia yang sedang membutuhkan dan berkomitmen untuk bertindak adil dalam segala sisi kehidupan. Melalui pemahaman Islam tentang kemanusiaan tentunya diharapkan terwujudnya masyarakat yang peduli terhadap sesama. Sehingga hal ini menjadi nilai utama dalam agama Islam untuk memiliki rasa kemanusiaan, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Kepedulian terhadap pengungsi Rohingya juga muncul dari nilai-nilai keagamaan yang didorong oleh ukhuwah Islamiah untuk membantu dan menolong sesama muslim yang tertindas. Sebagaimana Aceh yang dijuluki sebagai Seuramo Mekkah yang sangat identik dengan penerapan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi norma yang melekat sejak lama di Aceh.

---

<sup>48</sup> <https://nu.or.id/nasional/antropolog-uin-ar-raniry-pertolongan-darurat-harus-diutamakan-untuk-pengungsi-rohingya-5dtJA>

Di dalam hadis, Rasulullah saw juga mengajarkan umatnya untuk peduli antar sesama dan memiliki kemanusiaan, seperti yang diriwayatkan oleh Iman Bukhari “Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu, sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri”. Dalam hadis ini menegaskan bahwa cinta kasih, empati, simpati dan kepedulian terhadap sesama merupakan bagian integral dari imannya seorang muslim.

Agama islam telah mengajarkan bahwasanya tolong menolong merupakan hal yang harus dijunjung tinggi sebagai aspek kemanusiaan sehingga ini menjadi dasar masyarakat Aceh untuk peduli dan melindungi Pengungsi Rohingya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh ibu Syafridah SP, selaku staf manager program AWPF, beliau mengatakan bahwa:

*”Dalam agama Islam kita diperintahkan untuk membantu sesama manusia dari konteks itu kita harus memuliakan mereka sebagai tamu yang harus dijamu dalam 3 hari. Tetapi pada kenyataan yang kita lihat, mereka tidak lagi sebagai tamu, padahal mereka orang-orang tertindas yang harus kita jamu selamanya”.*<sup>49</sup>

Sifat Memuliakan tamu juga terdapat dalam Al-Qur’an seperti yang diterapkan oleh Nabi Ibrahim di jelaskan dalam surah Adh-Daariyat ayat 24-27. Sebagaimana firman Allah. “Sudah sampai kepadamu muhammad cerita tentang tamu Ibrahim (yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan? (Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempat lalu mengucapkan salamun. Ibrahim menjawab salamamum (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim lalu berkata silakan makan”. Dari ayat ini dapat diketahui salah satu sifat mulia Nabi Ibrahim adalah senang memuliakan tamu, padahal beliau tidak kenal dengan tamunya. Beliau tidak tahu bahwa tamu tersebut adalah malaikat, tapi ia tetap memperlakukan mereka dengan istimewa.

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Syafridah SP, selaku Staf Manager Program Aceh Women’s For Peace Fondation (AWPF) Aceh. Pada Tanggal 29 November 2024.

Sementara itu, Staf advokasi Flower Aceh, Ibu Geubrina Rezeky, menyampaikan isi kesepakatan dari kesebelas organisasi perempuan tersebut yaitu:

*“Semua pengungsi, khususnya anak-anak dan perempuan yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (kasus sedang dalam proses penyelidikan) perlu diperhatikan, dilindungi dan dipenuhi hak-hak mereka, terutama layanan hak dasar. Kita sebagai masyarakat Aceh yang mayoritas muslim harus iba terhadap pengungsi Rohingya yang juga mayoritas mereka adalah muslim. Apalagi didalam Islam mengatakan bahwa sesama muslim kita bersaudara. Jadi sudah sewajarnya kita membantu mereka yang kesusahan.”<sup>50</sup>*

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa kepedulian kepada pengungsi Rohingya dari nilai-nilai keagamaan, telah dilakukan oleh organisasi perempuan dengan menunjukkan sikap positifnya. Hal ini dilakukan oleh kedua organisasi perempuan Flower Aceh dan AWPF dengan memuliakan pengungsi Rohingya sebagai tamu yang harus dijamu selamanya sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang ada di Aceh, karena mayoritas dari pengungsi ini adalah muslim dan terdiri dari perempuan dan anak yang harus dilindungi dan dipenuhi hak mereka terutama hak dasar.

##### 5. Adat dan Tradisi

Kepedulian masyarakat Aceh kepada pengungsi Rohingnya didasari oleh adanya adat dan tradisi. Hukum adat dan tradisi menjadi salah satu faktor dari penerimaan pengungsi Rohingnya di Aceh yang di kenal dengan tradisi hukom laot. Sejarah hukom adat laot yang ada di Aceh sangat berkaitan erat dengan lembaga hukom adat laot, yang selanjutnya disebut sebagai panglima laot. Tugas dari panglima laot ini khusus dalam hal kelautan di Aceh, keberadaan hukom adat laot dan panglima laot Aceh menjadikan kehidupan laut Aceh menjadi tertib dan tertata. Hukum adat laut laot ini dikenal sebagai panglima laot, mewajibkan seluruh nelayan di Aceh untuk membantu setiap orang yang

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Geubrina Rezeky, Selaku Staf Advokasi Pemberdayaan Masyarakat Flower Aceh (FA). Pada Tanggal 20 November 2024 .



nyawanya terancam di laut. Sistem panglima laot ini telah berlaku sejak abad ke 17.

Menurut staff advokasi Flower Aceh dari divisi Pemberdayaan Masyarakat, Ibu Gebrina Rezeky, beliau berpendapat mengenai hukom adat laot yaitu:

*“Hukom adat laot dan panglima laot ibarat dua sisi mata uang, dimana antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hukom adat laot ini merupakan aturannya, sedangkan panglima laot ini adalah lembaga yang menegakkannya. Hukom adat laot tanpa panglima laot ibarat hukum yang tanpa penegak hukum, sedangkan sebaliknya panglima laot tanpa hukom adat laot ibarat penegak hukum yang tidak memiliki hokum”.*<sup>51</sup>

Sebagaimana hukum adat di Aceh, Panglima Laot ini didasarkan pada syariat islam dan mengatur seluruh aspek dalam praktik perikanan maupun kehidupan bermasyarakat dalam perkampungan nelayan di daerah pesisir. Tradisi Aceh yang kuat dalam memuliakan tamu, atau dikenal sebagai Peumulia Jamee. Peumulia jamee juga didasari dari pepatah Aceh *“pemulia jamee adat geutanyoe”*. pepatah ini sudah sangat lekat di telinga masyarakat Aceh. Sehingga pepatah tersebut di ucapkan dalam tradisi masyarakat setempat yang mempromosikan Aceh kepada wisatawan bagi tamu yang datang ke Aceh. Hal yang sama juga dilakukan dalam menerima kedatangan pengungsi Rohingya yang terombang ambing di lautan, sehingga menjadi penjelasan kebaikan hati yang ditunjukkan masyarakat Aceh kepada pengungsi Rohingya setelah mereka mendarat di Aceh. Hal ini juga menunjukkan keramahan masyarakat Aceh kepada Rohingya sebagai tamu, terutama kepada perempuan dan anak-anak. Hal ini sebagaimana pendapat yang di kemukan oleh ibu Irmasari, SH.i selaku Direktur AWPf bahwa:

*“Sebenarnya kalau ibu melihatnya, masyarakat Aceh itu masyarakat yang pemulia jamee adat geutanyoe (memuliakan tamu adat kita) yang sudah menjadi hukum adat tradisi masyarakat Aceh dalam memuliakan tamu. Tetapi sekarang ini karena banyaknya beredar berita hoax, banyak*

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Geubrina Rezeky, Selaku Staf Advokasi Pemberdayaan Masyarakat Flower Aceh (FA). Pada Tanggal 20 November 2024 .



*masyarakat kita menganggap kedatangan mereka sama seperti Israel yang merebut tanah Palestina, demikian juga dengan Rohingya ingin merebut tanah Aceh kita. Padahal kita tahu bahwa Rohingya itu adalah orang-orang yang tertindas di negaranya dan sudah menjadi kewajiban kita sesama manusia apalagi sesama muslim untuk membantu”.*<sup>52</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kepedulian terhadap pengungsi Rohingya yang ditunjukkan oleh organisasi perempuan berasal dari adat dan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Aceh. Hal ini dapat dilihat ketika pengungsi Rohingya terdampar di Aceh, masyarakat Aceh menyambut pengungsi dengan hukum laot yang ada di Aceh yang menggambarkan bahwa siapapun yang nyawanya sedang terancam di laut sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat Aceh khususnya nelayan yang menjadi tonggak dari penyelamatan pengungsi.

Selain itu adat dan tradisi *pemulia jame* (memuliakan tamu) juga menjadi suatu adat bagi masyarakat Aceh dalam memuliakan tamu yang datang yang mencerminkan keramahan masyarakat Aceh yang kuat dalam memuliakan tamu, dapat menjadi penjelasan kebaikan hati yang ditunjukkan warga Aceh pada pengungsi setelah mereka mencapai daratan. Hal ini juga menjadi penting dari keramahan masyarakat Aceh kepada Rohingya, terutama kepada perempuan dan anak-anak. Sehingga hal ini mempengaruhi sikap organisasi perempuan Flower Aceh dan AWPf dalam membantu pengungsi Rohingya ketika pengungsi sudah mencapai daratan.

Dalam konteks krisis pengungsi Rohingya di Aceh, kedua organisasi perempuan Flower Aceh dan AWPf telah menunjukkan etika kepedulian (*Ethics of Care*) karena menekankan pentingnya hubungan sosial, empati, dan tanggung jawab kolektif dalam merespons krisis kemanusiaan. Mereka yang terlibat langsung dalam membantu pengungsi Rohingya, didasarkan pada etika kepedulian yang mereka miliki. mereka tidak hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga secara emosional menunjukkan empati kepada pengungsi yang berasal

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara Dengan Irmasari SH.i, selaku Direktur Aceh Women's For Peace Fondation (AWPF). Pada Tanggal 29 November 2024.

dari beberapa sumber, yakni etika kemanusiaan khas perempuan, mandat lembaga, pengalaman konflik GAM dan Tsunami Aceh, nilai-nilai keagamaan, serta adat dan tradisi.

#### **4.2.2 Konsen Terhadap Kondisi Perempuan dan Anak**

Kehadiran pengungsi Rohingya di Aceh, menjadi masalah serius yang harus diselesaikan bersama. Hadirnya para pengungsi sangat berpengaruh pada kepedulian dari masyarakat Aceh, banyak individu dan oknum-oknum tertentu yang tidak konsen kepada pengungsi, sehingga mengabaikan kepedulian kepada pengungsi. Padahal para pengungsi ini terdiri dari perempuan dan anak yang sangat membutuhkan kepedulian. Organisasi perempuan seperti Flower Aceh dan AWPf justru menunjukkan empati terhadap kondisi pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh.

Dalam menyikapi krisis ini, organisasi perempuan menunjukkan sikap yang berempati kepada pengungsi Rohingya. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan empati ini muncul dari rasa kemanusiaan yang mendalam yang bersumber dari beberapa aspek.

##### **1. Kondisi penampungan yang tidak layak**

Kondisi tempat pengungsian yang buruk, menjadi salah satu hal yang turut disoroti oleh organisasi perempuan. Organisasi perempuan Flower Aceh dan AWPf, merasa prihatin terhadap kondisi pengungsi perempuan dan anak-anak, dimana tempat penampungan dirasa tidak cukup memadai untuk perempuan dan anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Irmasari SH.i. selaku Direktur AWPf mengatakan bahwa :

*“Sikap AWPf sendiri konsern kepada pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, tetapi ketika pengungsi perempuan dan anak datang ke Aceh dan sudah berdomisili di Aceh, AWPf ikut memberikan perhatian dan memberikan bantuan kepada mereka. Sehingga mereka mendapatkan hak-haknya sebagai perempuan dan manusia. Terlebih lagi apa kondisi mereka sangat-sangat harus dibantu ditambah lagi kondisi tempat penampungan mereka yang tidak layak dikhawatirkan malah nantinya mereka rawan*

*terkena sakit dan yang kami berikan cukup bermanfaat bagi mereka tetapi hanya sedikit bantuan yang mampu kami berikan kepada mereka”.*<sup>53</sup>

Pendapat lainnya juga dikemukakan oleh staf AWPF ibu Syafridah, SP dari divisi Manager Program, mengatakan bahwa belum terpenuhinya hak-hak perempuan pengungsi Rohingya dimana mereka harus disatukan dengan lawan jenisnya.

*“Menurut saya sendiri dan juga anggota AWPF yang lain, ketika melihat para pengungsi khususnya 80% perempuan dan anak di camp penampungan, kondisinya sangat memprihatinkan. Rawan sakit, tidak ada pembatas. Jadi pada awalnya, penampungan mereka di BMA itu tidak layak huni karena mereka disatukan dengan lawan jenis yang hanya tirai menjadi pembatas. Seharusnya sebagai perempuan, mereka harus mendapatkan tempat khusus seperti untuk perempuan yang sedang menyusui, perempuan yang sedang nifas, anak-anak. Mereka sebagai perempuan sangat membutuhkan tempat yang aman dan nyaman. Dan itu tidak didapatkan di tempat pengungsian, seperti yang kami lihat di Camp penampungan di BMA, Kuli dan Mina Raya di Pidie. Ditiga tempat penampungan yang kami lihat ini tidak ada satupun tempat yang layak untuk perempuan dan juga anak, baik untuk kesehatan, fisik dan juga mentalnya. Itu semua sangat tidak sesuai dan tidak pantas sebagai seorang perempuan tinggal di tempat yang seperti itu. Kami telah mendesak pemerintah untuk menyediakan tempat pengungsian sementara yang layak huni bagi mereka.”*<sup>54</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Gebrina Rezeky, dari divisi Pemberdayaan Masyarakat sebagai staff advokasi di Flower Aceh, mengatakan bahwa:

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara Dengan Irmasari SH.i, selaku Direktur Aceh Women’s For Peace Fondation (AWPF), Pada Tanggal 29 November 2024.

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Syafridah SP, selaku Staf Manager Program Aceh Women’s For Peace Fondation (AWPF) Aceh. Pada Tanggal 29 November 2024.

*“Menurut kami setelah melihat langsung kondisi pengungsi rohingya sangatlah miris, terlebih lagi pada saat mereka baru mendarat. Dan kebanyakan kondisi mereka sangat memprihatinkan lemah lesu seperti yang terakhir mendarat kemarin di Aceh Selatan, setelah beberapa kali mendapatkan penolakan. Terdapat banyak anak-anak dan 80 perempuan, dan 3 orang ibu hamil pada pendaratan di Aceh Selatan tersebut. Pengungsi Rohingya di tampung di tempat yang seadanya”.*<sup>55</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kondisi tempat penampungan sementara bagi pengungsi Rohingya tidak ramah terhadap perempuan dan anak karena hanya tirai yang menjadi pembatasnya. Organisasi perempuan Aceh telah mendorong pemerintah Aceh untuk mendesak pemerintah pusat untuk memberi perhatian yang serius terkait kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh, sehingga penyelesaiannya dapat melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga lain yang terkait sesuai yang diatur oleh PERPRES dan atau aturan lainnya baik nasional maupun internasional. Kedua organisasi ini juga telah mendorong pemerintah untuk memberikan penampungan sementara yang layak untuk pengungsi Rohingya dengan standard terpenuhinya Hak Asasi Manusia (HAM).

## 2. Perempuan dan Anak sebagai Korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu perbuatan, perekrutan, pengangkutan, penampungan, penyebaran, pemindahan seseorang dengan ancaman kejahatan. Perdagangan orang tidak luput dari suatu tindakan kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang melibatkan eksploitasi orang dengan cara memperdagangkan yang melibatkan perekrutan, mengangkut, memindahkan, menampung dan menerima orang dengan cara seperti penipuan, pemaksaan dan penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan untuk eksploitasi korban dengan kerja paksa dan perbudakan. Beredarnya informasi terkait pengungsi Rohingya di Aceh baik anak-anak dan

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Geubrina Rezeky, Selaku Staf Advokasi Pemberdayaan Masyarakat Flower Aceh (FA). Pada Tanggal 20 November 2024 .



perempuan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Penyebab tindak pidana perdagangan orang disebabkan oleh tingkat pendidikan perempuan etnis Rohingya yang rendah baik pengetahuan formal maupun pengetahuan informal karena daerah asal Rohingya mengalami konflik antar etnis dan pemerintah. Sehingga menyebabkan perempuan mudah diperdaya oleh pelaku perdagangan orang. Hal ini perlu diperhatikan, dilindungi, dan dipenuhi hak-hak mereka, terutama layanan hak dasar. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Ibu Irmasari, SH.i selaku Direktur AWPf mengatakan bahwa:

*“Dari informasi yang saya dapatkan, banyak pengungsi Rohingya yang kabur dari tempat penampungan dengan cara merusak pagar. Kami tidak tahu ke mana tujuan mereka tapi dugaannya mereka ke Malaysia. Banyak pengungsi kemudian berupaya mencari suaka ke Malaysia lewat kelompok-kelompok kecil atau sindikat perdagangan manusia. Pengungsi Rohingya itu rela membayar sejumlah uang untuk bisa melakukan perjalanan lewat laut dengan tujuan utama ke Malaysia.”<sup>56</sup>*

Kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia semakin meningkat sejak adanya penerimaan oleh masyarakat Aceh. Hal ini dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap etnis Rohingya. Aceh kerap menjadi tempat persinggahan pengungsi Rohingya. Apalagi syariat Islam yang disandang Aceh harus menjadi tameng terdepan dari setiap persoalan. Dalam konteks masifnya penolakan terhadap pengungsi Rohingya munculnya *Framing* di media tentang para penyeludupan manusia. Sehingga hal ini mempengaruhi sifat dari kedua organisasi perempuan Flower Aceh dan AWP, untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak di tengah gejolak isu perdagangan orang terhadap pengungsi.

#### **4.2.3 Keprihatinan Akan Penyebaran Hoaks dan Penolakan Masyarakat**

1. Hoaks dan Provokasi

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara Dengan Irmasari SH.i, selaku Direktur Aceh Women's For Peace Fondation (AWPF), Pada Tanggal 29 November 2024



Sikap masyarakat Aceh yang menolak kehadiran pengungsi Rohingya sangat berbeda dengan sikap warga yang menerimanya pada tahun 2012 yang lalu. Di tahun 2023, kehadiran pengungsi Rohingya mendapatkan respon negatif yang disebabkan oleh banyaknya informasi keliru terkait status pengungsi Rohingya. Berdasarkan penelusuran pada konten-konten yang diposting media baik dalam bentuk video maupun berita, gambar dan meme, terdapat beberapa alasan penolakan dan pengusiran pengungsi Rohingya di Aceh, diantaranya adanya sentimen ekonomi, alasan keamanan nasional Aceh, alasan adat istiadat sosial masyarakat, upaya antisipasi dari pengalaman israel yang menguasai palestina, serta adanya isu Rohingya membawa penyakit menular seperti HIV/AIDS dan perilaku buang air besar sembarangan.<sup>57</sup> Semua alasan tersebut *viral* dan *trending* di media massa hingga terbentuknya satu sikap dalam pikiran setiap orang untuk menolak dan mengusir Rohingya di Aceh.

Informasi hoaks dan ujaran kebencian terhadap pengungsi Rohingya di media sosial sengaja disebarkan oleh oknum-oknum tertentu. Pergerakan berita hoax ini berendar dengan sangat cepat dan trending di media sosial sehingga bukan hanya pandangan masyarakat Aceh, pandangan masyarakat Indonesia terhadap Rohingya juga semakin memburuk. Hal ini sebagaimana di sampaikan oleh Ibu Gebrina Rezeky sebagai staff advokasi dari divisi Pemberdayaan Masyarakat di Flower Aceh, yaitu:

*“Saya pernah dengar informasi hoaks yang mengatakan bahwa pengungsi Rohingya itu akan diberikan jaminan uang sejuta lebih dari pemerintah Indonesia tanpa harus bekerja. Berita hoaks ini membuat masyarakat marah karena pemerintah memberikan uang secara cuma-cuma kepada Rohingya sedangkan masih banyak masyarakat kita yang harus bekerja keras demi mendapatkan upah dibawah standar”.*<sup>58</sup>

Mengutip dari Cek Fakta Tempo, berita tersebut menyesatkan karena pengungsi Rohingya mendapatkan uang tersebut dari Internasional Organization

---

<sup>57</sup> Muhammad Yamin. 2024. “ *Duka Pengungsi Rohingya Catatan Kaum Stateless People Myanmar.*” Bandar Publishing: Banda Aceh.

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Geubrina Rezeky, Selaku Staf Advokasi Pemberdayaan Masyarakat Flower Aceh (FA). Pada Tanggal 20 November 2024.

for Migration (IOM), dan bukan menggunakan uang negara.<sup>59</sup> Ketidakjelasan isu pemberitaan konflik Rohingya di media massa dapat memberikan pengaruh besar terhadap beberapa organisasi perempuan di Aceh yaitu AWPf dan Flower Aceh, sehingga menimbulkan respon kepedulian dan kemanusiaan untuk saling menolong dan membantu pengungsi Rohingya di Aceh.

Isu pengungsi Rohingya menjadi salah satu pembicaraan yang hangat di media sosial. Perkembangan dunia digital yang sangat pesat telah menysar ke segala sisi kehidupan manusia. Namun masih banyak pengguna internet yang belum mampu menerima informasi mentahan tanpa mengolah kebenaran informasi secara baik yang menyebabkan banyak masyarakat terpapar oleh informasi yang tidak benar. Maraknya akun di media sosial yang berisi kecaman dan penolakan terhadap warga Rohingya, menyebabkan provokasi terhadap masyarakat yang membangkitnya kemarahan dan tindakan penghasutan dan pancingan kerusuhan, kebencian dan krisis sosial. Beragam alasan dikemukakan soal perilaku mereka yang dianggap tidak punya adab, membuat masalah di kawasan penampungan, sampai menyamakan mereka dengan kaum zionis Yahudi yang akan merebut wilayah penampungan menjadi negara mereka.

Segala bentuk provokasi terhadap pengungsi Rohingya dapat dipandang sebagai strategi dehumanisasi, yaitu mecerabut unsur-unsur kemanusiaan yang melekat pada setiap manusia. Dengan dehumanisasi tersebut mereka akan diposisikan sebagai penjahat dan perusuh. Hal ini sangat disayangkan karena sebagian masyarakat Aceh terkena stigma negatif ikut terprovokasi oleh isu penolakan pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa di Aceh. Penyebaran ujaran kebencian di media massa juga menimbulkan kebencian dan kemarahan di masyarakat. Sehingga munculnya beberapa oknum di tengah kesemrautan penerimaan pengungsi Rohingya yang memanasakan kondisi yang ada.

Masyarakat sangat mudah terprovokasi setelah menonton beberapa informasi yang beredar di media sosial yang viral dan trending menjelek-

---

<sup>59</sup> <https://www.tempo.co/newsletter/cekfakta-240-ada-apa-di-balik-serbuan-kabar-bohong-tentang-pengungsi-rohingya-di-medsos--103267>

jelakan dan *bullying* terhadap pengungsi Rohingya dan sangat mudah termakan dengan isu yang ada. Karena masyarakat tidak melihat hal tersebut secara halostik dan menyeluruh. Provokasi ini tentunya dapat mengganggu rasa kemanusiaan masyarakat, apalagi pengungsi ini sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak yang harus kita tolong, tetapi justru masyarakat sudah terpengaruhi oleh provokasi. Ibu Irmasari, SH.i selaku Direktur AWPf mengatakan bahwa:

*“Masyarakat kita sudah terprovokasi dengan beredarnya informasi hoax salah satunya seperti pengungsi Rohingya datang ke Aceh itu ada tujuan ingin menguasai Aceh suatu saat nanti. Makanya ada pengusiran oleh oknum mahasiswa dan juga masyarakat yang sudah termakan provokasi informasi hoax. Kami sangat menyayangkan aksi pengusiran ini, salah satu upaya yang telah kami lakukan adalah berdiskusi dengan masyarakat setempat untuk tidak mudah termakan berita hoax”.*<sup>60</sup>

Dampak dari provokasi ini dapat dilihat dari anarkisnya sikap mahasiswa di Aceh terhadap pengungsi Rohingnya yang seolah tidak lagi memiliki kesadaran historis. Tindakan mereka ini telah diprovokasi oleh berita-berita bohong yang tersebar dan menjelek-jelekan pengungsi Rohingnya. Sehingga menimbulkan tindakan pengusiran terhadap pengungsi ini. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Meutya Farida, staf AWPf divisi administrasi dan keuangan bahwa:

*“Harusnya mahasiswa bisa sedikit jeli dan tidak menelan mentah-mentah informasi bohong tersebut, informasi ini betul-betul membuat pikiran mereka menjadi buntu. Karena sebagai agent of change mereka menjadi penengah bukan malah sebaliknya”.*<sup>61</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, Organisasi Perempuan telah menunjukkan sifat positifnya kepada pengungsi Rohingnya dalam menangani permasalahan provokasi dari beredarnya informasi hoax. Salah satu langkah yang telah dilakukan oleh organisasi perempuan Flower Aceh dan AWPf adalah

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Irmasari SH.i, selaku Direktur Aceh Women’s For Peace Fondation (AWPF), Pada Tanggal 29 November 2024.

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Meutya Farida, Staf Administrasi dan Keuangan Aceh Women’s For Peace Fondation (AWPF) Pada Tanggal 29 November 2024.

dengan berdiskusi kepada masyarakat setempat untuk tidak mudah termakan berita hoax.

## 2. Demonstrasi

Demonstrasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk mengeluarkan pendapat dan pertentangan terhadap suatu kebijakan yang di anggap tidak sesuai dengan aturan hukum dan hak asasi manusia. Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan hak setiap orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Penyampaian pendapat dimuka umum sering menimbulkan kericuhan. Demonstrasi umumnya dilakukan oleh sekelompok mahasiswa atau orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan menentang kebijakan pemerintah.

Indonesia bukanlah negara yang wajib menerima dan mengurus pengungsi luar negeri karena Indonesia tidak ikut meratifikasi konvensi 1951 tentang status pengungsi dan protokol 1967 tentang status pengungsi. Meskipun Indonesia tidak wajib menerima pengungsi, Pemerintah Indonesia tetap menampung dan menerima penungsi Rohingya karena didasari oleh HAM. Salah satu permasalahan yang paling menonjol dalam penanganan pengungsi Rohingya di Aceh adalah adanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa di Aceh yang menuntut pemerintah untuk segera memindahkan pengungsi Rohingya dari Balai Meuseraya Aceh (BMA). Penolakan dan pengusiran ini membuat kondisi pengungsi yang sebagian besarnya adalah perempuan dan anak semakin menderita. Mereka menghadapi diskriminasi yang bertubi-tubi karena tidak memiliki status kewarganegaraan, berada dalam ancaman persekusi, dan menghabiskan hidupnya dalam pelarian dan pengungsian.

Tindakan Pengusiran paksa terhadap pengungsi Rohingya di Aceh merupakan tindakan anarkis yang tidak hanya mencoreng citra kemanusiaan, dan merusak reputasi Aceh sebagai daerah yang selama ini dikenal terbuka sebagaimana yang telah mereka tunjukkan saat menyuarakan tagar #Save Rohingya# pada tahun 2017.<sup>62</sup> Aksi demonstrasi yang dilakukan secara tidak

---

<sup>62</sup> Saiful, Masni. Dalam buku “ *Duka Pengungsi Rohingya Catatan Kaum Stateless People Myanmar*.”



bermartabat oleh sebagian mahasiswa yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) beberapa Universitas di Aceh pada Rabu tanggal 27 Desember 2023. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Irmasari, SH.i selaku Direktur AWPf.

*“Saya sangat menyayangkan terhadap aksi penolakan terhadap kedatangan pengungsi Rohingya. Adanya penolakan pengungsi Rohingya oleh mahasiswa Aceh sendiri, walaupun kita belum mengetahui apakah penolakan ini dari masyarakat atau oknum masyarakat kecil tertentu yang tidak suka dengan kedatangan pengungsi Rohingya. Seperti adanya mahasiswa yang datang ke Balai Meuseuraya Aceh (BMA) untuk menolak kedatangan rohingya. Kita merasa bahwa pengungsi ini adalah perempuan yang harus kita manusiakan. Kita menginginkan mereka mendapatkan hak yang sama seperti kita, seperti hak hidup, hak mendapatkan pengetahuan serta hak mendapatkan pendidikan”.*<sup>63</sup>

Hal serupa juga di kemukan oleh Gebrina Rezeky sebagai staff advokasi dari Divisi Pemberdayaan Masyarakat di Flower Aceh, yang prihatin terhadap aksi demonstrasi pengusiran pengungsi Rohingya, yaitu:

*“Flower Aceh sangat menyesali aksi demo yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa di Banda Aceh ini. Hal ini disebabkan banyaknya berita hoaks dan narasi kebencian terhadap etnis Rohingya. Kejadian yang sangat memprihatinkan terkait pengungsi Rohingya di Aceh ketika sejumlah mahasiswa melakukan pengusiran terhadap 137 orang pengungsi Rohingya yang didominasi perempuan dan anak-anak di BMA pada tahun lalu. Kami sebagai organisasi-organisasi yang berkomitmen untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak sangat prihatin dengan situasi ini”.*<sup>64</sup>

Tindakan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di Aceh terhadap pengungsi Rohingnya seolah tidak lagi memiliki kesadaran historis. Padahal, sejumlah aksi mahasiswa berdasarkan sejarah lebih menitikberatkan

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Irmasari SH.i, selaku Direktur Aceh Women’s For Peace Fondation (AWPF), Pada Tanggal 29 November 2024.

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Geubrina Rezeky, Selaku Staf Advokasi Pemberdayaan Masyarakat Flower Aceh (FA). Pada Tanggal 20 November 2024.



pada visi perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan. Namun hal ini berbanding terbalik pada saat penanganan terhadap pengungsi Rohingya di Aceh. Sebagaimana ungkapan Ibu Meutya Farida, dari divisi administrasi dan keuangan AWPF:

*“Kita menyesalkan ketika adik-adik mahasiswa melakukan intimidasi, kekerasan yang menimbulkan trauma kepada pengungsi, terutama kepada kelompok rentan, anak dan perempuan. Mereka gagal paham soal sebab musabab orang Rohingya terdampar ke Aceh, lalu bertindak bagaikan robot-robot kosong etika. Hal ini sangat di sayangkan”*.<sup>65</sup>

**Gambar 4.1 Pemindahan Secara Paksa Pengungsi Rohingya oleh Mahasiswa**



Sumber:<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cyr3ykvjxp0o>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa Aceh sebagai masyarakat yang ikut berdemonstrasi, Yasmin dirinya menolak keberadaan pengungsi Rohingya karena:

*“Banyak mereka melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya, kayak sering mogok makan, minta tempat yang layak. Seharusnya mereka lebih sadar tidak membuat kekacauan di Aceh, tapi kayak merasa ini tuh negara mereka. Merasa seperti nggak patut”*.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Meutya Farida, Staf Administrasi dan Keuangan Aceh Women’s For Peace Fondation (AWPF), Pada Tanggal 29 November 2024.

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Yasmin, Selaku Mahasiswa Aceh Yang Mengikuti Demonstrasi, Pada Tanggal 1 Desember 2024.

Tindakan demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat terkait penolakan terhadap pengungsi Rohingya di nilai telah mencoreng nama Aceh yang di kenal terbuka dalam penanganan pengungsi Rohingya. Hal ini berbanding terbalik pada saat penanganan terhadap pengungsi Rohingya di Aceh. Sehingga kedua organisasi perempuan AWPf dan juga Flower Aceh sangat menyayangkan terkait hal ini. Dimana kedua organisasi ini dikenal sebagai organisasi yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menghormati hak asasi perempuan.

### **4.3 Peran Organisasi Perempuan dalam Merespons Krisis Pengungsi Rohingya di Aceh**

Memberikan bantuan kepada pengungsi adalah tanggung jawab semua pihak atas dasar kemanusiaan. Berdasarkan konvensi 1952 dan protokol 1967, maka UNHCR menjadi organisasi internasional yang berwenang dalam memberikan perlindungan bagi pengungsi Rohingya. Meskipun demikian, organisasi perempuan di Aceh telah mengambil peran dalam memberikan bantuan, memberikan rasa aman dan nyaman terhadap pengungsi Rohingya, khususnya pengungsi anak dan perempuan.

Jika dilihat dari segi perlindungan dan pemenuhan hak-hak yang sudah diberikan oleh UNHCR dan pemerintah selama ini terhadap pengungsi perempuan dan anak-anak yang ada di Aceh, belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan sesuai dengan standarisasi. Diperlukan peranan dan keterlibatan berbagai organisasi termasuk organisasi perempuan Flower Aceh dan AWPf yang berfokus dalam melindungi hak asasi perempuan dan anak. Dalam mengatasi permasalahan ini peran yang telah diberikan oleh kedua organisasi ini, antara lain yaitu:

#### **4.3.1 Distribusi Bantuan Kemanusiaan**

Dalam menangani masalah pengungsi, terutama dalam memenuhi hak perempuan dan anak, diperlukan keterlibatan organisasi perempuan di Aceh dalam mendistribusikan bantuan kemanusiaan dalam meringankan beban pemerintahan dalam membantu pengungsi Rohingya. Keterlibatan organisasi

perempuan dalam mendistribusikan bantuan kemanusiaan telah dilakukan oleh organisasi perempuan di Aceh. Seperti AWPf yang telah mengirimkan anggota-anggotanya yang tergabung dalam AWPf yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk bertugas membantu, dan menyediakan bahan-bahan pokok bagi para pengungsi, terutama pengungsi yang berkebutuhan khusus. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Irmasari SH.i, selaku Direktur AWPf mengatakan bahwa:

*“Sikap AWPf sendiri konsern kepada pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, tetapi ketika pengungsi perempuan dan anak datang ke Aceh dan sudah berdomisili di Aceh, AWPf ikut memberikan perhatian dan memberikan bantuan kepada mereka. Sehingga mereka mendapatkan hak-haknya sebagai perempuan dan manusia. Terlebih lagi kondisi mereka sangat-sangat harus dibantu dan yang kami berikan cukup bermanfaat bagi mereka tetapi hanya sedikit bantuan yang mampu kami berikan kepada mereka”.*<sup>67</sup>

Bantuan kemanusiaan yang diberikan berupa makanan bergizi maupun *personal hygiene* seperti celana dalam, baju dalam dan pembalut untuk perempuan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Syafridah SP, staf manager program AWPf, mengatakan bahwa:

*“Kami telah menyumbangkan makanan bergizi, celana dalam, serta pembalut untuk perempuan serta peralatan belajar kepada anak-anak Rohingya, bantuan yang kami berikan ini bersumber dari salah satu lembaga di Asia Pasifik namun kami tidak bisa mempublikasikan nama lembaga tersebut.”*<sup>68</sup>

#### **Gambar 4.2 Penyerahan Bantuan Kepada Pengungsi Perempuan dan Anak-Anak di BMA oleh AWPf Aceh**

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Irmasari SH.i, selaku Direktur Aceh Women’s For Peace Fondation (AWPF), Pada Tanggal 29 November 2024.

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Syafridah SP, selaku Staf Manager Program Aceh Women’s For Peace Fondation (AWPF) Aceh. Pada Tanggal 29 November 2024.



Sumber: Olah data primer dari AWPF

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi perempuan AWPF Aceh telah menunjukkan peran positifnya dalam merespon krisis pengungsi Rohingnya di Aceh. Salah satu peran yang telah organisasi AWPF lakukan yakni mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingnya di Balai meuseraya Aceh (BMA) dalam bentuk bantuan khusus yang diberikan kepada pengungsi perempuan dan anak. Bantuan kemanusiaan yang telah diberikan dalam bentuk makanan bergizi maupun personal *hygiene* seperti celana dalam, baju dalam dan pembalut untuk perempuan.

Bantuan ini diberikan sebagai salah satu upaya perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi kelompok rentan tindak kekerasan dan diskriminasi, dengan bekerja keras dalam memberikan bantuan untuk meringankan penderitaan Pengungsi. Maka dalam kondisi darurat, organisasi perempuan AWPF selalu melakukan upaya agar segala kebutuhan pengungsi terpenuhi dengan baik, sehingga dapat memberikan cerminan bahwa bantuan kemanusiaan yang diberikan adalah bantuan yang sangat dibutuhkan bagi anak-anak dan perempuan di tempat pengungsian.

#### **4.3.2 Pendataan Kebutuhan Pengungsi**

Pendataan merupakan suatu proses pencatatan yang benar dan nyata tentang keterangan, baik manusia, benda, lingkungan maupun kejadian



tertentu. Pendataan terhadap kebutuhan pengungsi Rohingya dilakukan oleh organisasi perempuan Flower Aceh dengan mengadakan *assessment* terhadap pengungsi perempuan dan anak Rohingya. *Assessment* ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi, kondisi pengungsi terkait kondisi keamanan, kenyamanan, mengidentifikasi kebutuhan dasar yang diperlukan, apakah sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau belum. Hal ini di sampaikan oleh Ibu Geubrina Rezeky, staff advokasi Flower Aceh dari divisi Pemberdayaan Masyarakat, yaitu:

*“Flower Aceh pernah melakukan assessment dan pendataan kepada perempuan dan anak Rohingya. Hal ini menjadi upaya yang kami lakukan untuk mendapatkan data dan informasi kondisi pengungsi maupun pendataan kebutuhan yang dibutuh oleh pengungsi terkait kondisi keamanan, kenyamanan, apakah sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) atau belum. Dari assessment ini, para pengungsi perempuan masih sangat membutuhkan pakaian layak dan hygiene kit”.*<sup>69</sup>

**Gambar 4.3 Assessment pendataan bersama dengan pengungsi perempuan Rohingya**



Sumber: Olah data primer dari Flower Aceh

Berdasarkan hasil wawancara di atas, organisasi perempuan di Aceh telah memainkan peranannya dalam membantu Rohingya. Organisasi perempuan Flower Aceh telah melakukan *assessment* dan pendataan kepada pengungsi

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Geubrina Rezeky, Selaku Staf Advokasi Pemberdayaan Masyarakat Flower Aceh (FA). Pada Tanggal 20 November 2024.



Rohingya untuk menilai kebutuhan tempat penampungan dan memberikan perlindungan. *Assessment* ini bertujuan untuk mengetahui kondisi terkini pengungsi Rohingya. Berdasarkan hasil *assessment* ini, organisasi perempuan dapat mengetahui bahwa para pengungsi perempuan masih sangat membutuhkan pakaian layak dan hygiene kit.

### **4.3.3 Edukasi Untuk Masyarakat**

Edukasi adalah suatu proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dan masyarakat dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Dalam menangani permasalahan pengungsi Rohingya, organisasi perempuan telah melakukan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat dan pengungsi Rohingya. Edukasi kepada masyarakat juga dilaksanakan oleh organisasi perempuan AWPF. Organisasi ini mengadakan sosialisasi dan diskusi dengan masyarakat untuk tidak beranggapan buruk kepada Rohingya. Anggapan buruk ini dibuktikan dari sikap masyarakat dan mahasiswa yang telah melakukan demonstrasi untuk mengusir paksa pengungsi Rohingya, memperlihatkan kurangnya empati dan pemahaman dari masyarakat kita terhadap penderitaan yang dialami oleh para pengungsi yang sebagian besar melarikan diri dari penindasan dan kekerasan di negara asalnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur AWPF, Ibu Irmasari SH,i yaitu:

*“Kami AWPF sering memberikan sosialisasi dan diskusi kepada masyarakat untuk tidak membenci Rohingya, selalu mengenal Rohingya lebih dalam, lebih peduli kepada Rohingya. Karena kadang-kadang pengungsi Rohingya tidak tau dan membuat kita benci terhadap mereka. Seperti mereka mencuri buah kelapa warga, mungkin mereka membutuhkan itu karena kehausan dan terpaksa harus mencuri. Dan ketika kita sudah memahami mereka, mereka juga akan tau. Dan AWPF pernah membuat edukasi dengan beberapa mahasiswa di pidie, tetapi pada kenyataannya banyak mahasiswa yang tidak peduli dan kurang pro aktif kepada Rohingya. Tetapi setelah kami memberikan pemahaman dan*

*penjelasan terkait dengan kondisi rohingya, membuat mereka lebih percaya, sehingga kita bisa membangun bangun kesadaran-kesadaran kepada masyarakat”.*<sup>70</sup>

Sementara itu ibu Syafridah SP, dari divisi Manager Program AWPF menyampaikan yaitu:

*“Kami selalu mensosialisasikan hak-hak perempuan dan anak. Mereka ini harus mendapatkan pelayanan khusus, seperti anak yang harus mendapatkan pola pengasuhan yang baru dan bagus dari orang tuanya. Karena yang kita ketahui pengungsi perempuan tidak boleh sembarangan keluar dari tempat pengungsian. Mereka harus berada di camp pengungsian, karena sebagian besar mereka menganut agama atau paham yang tidak boleh keluar rumah tanpa mahram dan menganut mazhab maliki. Jadi para pengungsi ini selalu mengenakan niqab (cadar). Tetapi AWPF selalu lebih memberikan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan kepada mereka. Hal ini tidak saja dilakukan oleh AWPF, tetapi juga diterapkan oleh beberapa organisasi lainnya”.*<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, organisasi perempuan AWPF telah menunjukkan peranan positifnya dalam merespon krisis pengungsi Rohingya di Aceh. Peran organisasi perempuan dalam merespons krisis pengungsi Rohingya di Aceh telah dilakukan oleh organisasi perempuan ini, telah melakukan perannya dengan mengadakan edukasi kepada pengungsi Rohingya dengan mensosialisasikan hak-hak perempuan dan anak dan juga edukasi kepada masyarakat untuk tidak beranggapan buruk kepada Rohingya karena sebagian masyarakat Aceh sangat benci dengan kehadiran pengungsi Rohingya. Edukasi ini juga telah dilakukan kepada mahasiswa di Pidie yang tidak peduli dengan Rohingya, ketika organisasi perempuan telah memberikan pemahaman dan penjelasan terkait kondisi Rohingya, membuat mereka lebih percaya, sehingga melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi ini, organisasi

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Irmasari SH.i, selaku Direktur Aceh Women’s For Peace Fondation (AWPF), Pada Tanggal 29 November 2024.

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Syafridah SP, selaku Staf Manager Program Aceh Women’s For Peace Fondation (AWPF) Aceh. Pada Tanggal 29 November 2024.

perempuan di Aceh bisa membangun kesadaran-kesadaran kepada masyarakat dan bisa menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai antara masyarakat dan pengungsi Rohingya, melalui edukasi yang baik.

#### **4.3.4 Kolaborasi dan Kerjasama**

Kolaborasi adalah suatu proses kerjasama, yang melibatkan aktivitas tertentu bertujuan untuk saling membantu dan memahami aktivitas masing-masing. Dalam penanganan pengungsi Rohingya, organisasi perempuan Flower Aceh terus mendorong kerjasama dengan organisasi dan LSM lainnya di Aceh salah satunya adalah organisasi Yayasan Geutanyoe, Yayasan Madani Indonesia (YKMI) dan Pemerintah Daerah. Dengan tujuan untuk mencari solusi bersama dalam mengatasi permasalahan pengusiran secara paksa terhadap pengungsi Rohingya. Kerjasama yang dilakukan oleh organisasi perempuan Flower Aceh melakukan diskusi dengan Dinas sosial Aceh, yang bertujuan mendorong pemerintah Aceh dalam melakukan penanganan dan penyelesaian permasalahan pengungsi Rohingya secara bermartabat berdasarkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu, AWPF sebagai organisasi perempuan di Aceh dalam menangani pengungsi juga telah menjalin kerjasama dan berkolaborasi dengan organisasi lainnya seperti Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia (YKMI) dengan mengadakan kegiatan di kamp pengungsian di Mina Raya Padang Tiji Kabupaten Pidie, dengan memberikan perlindungan dan bantuan logistik khususnya kepada perempuan dan anak-anak.

Hal ini di kemukakan oleh staf AWPF, ibu Syafridah SP, dari divisi Manager Program yaitu:

*“Kami bekerjasama dengan beberapa organisasi lain dalam penanganan pengungsi Rohingya. Salah satunya yaitu dengan Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia (YKMI) dengan mengadakan kegiatan di kamp*

*pengungsian di Mina Raya Padang Tiji Kabupaten Pidie, saat memberikan bantuan logistik”.*<sup>72</sup>

AWPF sebagai organisasi perempuan di Aceh dalam menangani pengungsi telah melakukan pendampingan untuk pengungsi Rohingya dengan menjalin kerja sama dengan organisasi lainnya seperti Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia (YKMI) dengan mengadakan kegiatan di Kamp Pengungsian di Mina Raya Padang Tiji Kabupaten Pidie, dengan memberikan perlindungan dan bantuan logistik khususnya kepada perempuan dan anak-anak. Hal ini sebagaimana di disampaikan oleh ibu Meutya Farida, devisi Administrasi dan keuangan AWPF:

*“Sebenarnya AWPF tidak konsern untuk pengungsi Rohingya, tetapi pada tahun 2023 terjadi gejolak yang dilakukan oleh mahasiswa menolak pengungsi Rohingya. Latar belakang AWPF ini berpartisipasi terhadap pengungsi Rohingya, karena ada donornya AWPF memberikan support untuk mendukung pengungsi Rohingya. Karena sebagian besar pengungsi ini adalah perempuan dan anak. Pada dasarnya fokus utama AWPF ini adalah kepada perempuan dan anak, tidak fokus kepada pengungsi Rohingya secara keseluruhan. Sehingga AWPF lebih memberikan pendampingan dan bantuan kepada pengungsi perempuan dan anak, seperti perempuan hamil dan menyusui, perempuan yang baru melahirkan, serta anak balita”.*<sup>73</sup>

Selain itu organisasi perempuan AWPF juga melakukan kerjasama dengan mendorong ulama, tokoh masyarakat serta media untuk menyampaikan pernyataan dan informasi yang menyejukkan bagi masyarakat dalam menghadapi persoalan penolakan kedatangan Rohingya serta mendorong masyarakat melakukan pemantauan untuk penyelesaian masalah pengungsi. Hal ini menjadi salah satu langkah yang dilakukan oleh AWPF dalam menangani permasalahan penolakan Rohingya yang disebabkan oleh beredarnya informasi hoax sehingga menimbulkan provokasi terhadap keberadaan pengungsi Rohingya. Berdasarkan

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Syafridah SP, selaku Staf Manager Program Aceh Women’s For Peace Fondation (AWPF) Aceh. Pada Tanggal 29 November 2024.

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Meutya Farida, Staf Administrasi dan Keuangan Aceh Women’s For Peace Fondation (AWPF) Pada Tanggal 29 November 2024.



dari hasil wawancara bersama ibu irmasari, SH.i selaku direktur AWPF, mengatakan bahwa:

*“kami, AWPF telah melakukan berbagai upaya dalam menghadapi permasalahan Rohingya di Aceh. Hal ini kami lakukan dengan mendorong ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat untuk menyampaikan pernyataan dan informasi yang menyejukkan bagi masyarakat dalam menghadapi persoalan Rohingya. Serta kami juga telah mendorong media untuk menyampaikan informasi terkait isu Rohingya dengan menggunakan prinsip jurnalis damai”.*<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, organisasi perempuan di Aceh telah berperan dalam merespons krisis pengungsi Rohingya di Aceh dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk menciptakan kenyamanan bagi pengungsi Rohingya ditengah pengusiran secara paksa terhadap mereka.

Teori organisasi perempuan yang dikemukakan oleh Hebert A.Simon menekankan pentingnya keberadaan organisasi perempuan didalam masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Dalam konteks ini peran Flower Aceh dan AWPF sebagai organisasi perempuan di Aceh sangat relevan dalam menangani permasalahan Rohingya di Aceh. Flower Aceh merupakan organisasi yang ikut berpartisipasi dalam melakukan edukasi terhadap masalah kekerasan berbasis gender (GBV) yang dialami oleh para pengungsi, termasuk pada perempuan dan anak-anak dari pengungsi Rohingya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua organisasi ini telah berperan dalam mendistribusikan bantuan kemanusiaan, pendataan kebutuhan pengungsi, edukasi kepada masyarakat dan pengungsi Rohingya serta melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Peran yang telah dilakukan ini telah sesuai dengan teori etika kepedulian feminis yang dikemukakan oleh Carol Gilligan. Hal ini dapat di lihat dari adanya edukasi terkait Gender Vased Violec (GBV) yang dilakukan oleh Flower Aceh, mendorong pemerintah untuk segera mengambil

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Irmasari SH.i, selaku Direktur Aceh Women’s For Peace Fondation (AWPF), Pada Tanggal 29 November 2024.



tindakan dalam menangani kasus pengungsi Rohingya, serta dengan diadakannya *asessment* dari Flower Aceh bersama dengan pengungsi perempuan Rohingya sebagai wujud kepedulian atau empati yang telah ditunjukkan oleh organisasi Flower Aceh. Dalam hal ini, Flower Aceh juga telah berupaya dalam memberikan pemahaman kepada pengungsi perempuan ini untuk memerangi angka kekerasan kepada pengungsi Rohingya terutama perempuan dan anak-anak, yang sering kali menjadi kelompok yang paling rentan dalam situasi konflik.

AWPF dan Flower Aceh telah mengambil peranannya dalam merespon krisis pengungsi Rohingya di Aceh. Meskipun yang berwenang dalam merespon permasalahan yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya ini adalah UNHCR, namun organisasi ini tetap memberikan kontribusi terbaiknya dalam membantu menangani permasalahan tersebut. Jika dianalisa berdasarkan teori organisasi perempuan yang dikemukakan oleh Julia Cleves Mosse, maka AWPf dan Flower Aceh sebagai salah satu organisasi perempuan di Aceh yang termasuk kedalam organisasi kelompok akar rumput, seperti kesehatan, pemberantasan buta huruf, kekerasan, hukum dan persoalan politik dari sudut pandang feminis telah menjalankan visi dan misinya dalam membela hak-hak dasar perempuan untuk memastikan kesetaraan gender, sejahtera dan berkeadilan sebagai wujud inisiasi damai dari perempuan untuk semua, sosialisasi dan diskusi kepada masyarakat untuk tidak membenci Rohingya, sosialisasi tentang hak-hak perempuan dan anak, melakukan pendampingan untuk pengungsi Rohingya dengan menjalin kerja sama dengan dengan organisasi lainnya seperti Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia (YKMI), serta fokus terhadap isu pengungsi Rohingya yang berkaitan dengan perempuan dan anak-anak.

#### **4.4 Tantangan Organisasi Perempuan Dalam Merespons Krisis Pengungsi Rohingya Di Aceh**

Dalam merespons krisis pengungsi Rohingnya di Aceh, tentunya organisasi perempuan di Aceh menghadapi berbagai tantangan, di antaranya sebagai berikut:

##### **4.4.1 Tantangan Administratif**

Dalam melaksanakan perannya, organisasi perempuan kerap kali menghadapi tantangan administrasi yang terdiri dari 2 Aspek :

1. Ketidakakuratan data pengungsi Rohingya

Tidak akuratnya data jumlah pengungsi Rohingya menjadi suatu tantangan bagi salah satu organisasi perempuan dalam mendistribusikan bantuan kepada pengungsi. Ketidakakuratan data ini membuat organisasi perempuan seperti AWPF terhambat dalam memberikan bantuan kepada pengungsi khususnya kepada perempuan dan anak. Bantuan yang sudah diberikan terkadang tidak tersalurkan sama rata kepada pengungsi, di akibatkan jumlah kehadiran mereka sering kali bertambah dan berkurang, ada sebagian besar dari pengungsi pergi untuk melanjutkan perjalanan mereka. sehingga bantuan yang sudah diberikan tidak tersalurkan dengan baik sesuai target awal. Hal ini disampaikan dari staf AWPF, divisi Manager Program ibu Syafridah SP, yaitu:

*“Tantangan awal kami dimulai dari tidak akuratnya data terkait jumlah pengungsian. Misalnya kita hari ini mendapatkan data jumlah pengungsi Rohingya di suatu tempat sebanyak 200 orang, besoknya pada saat kita kesana ingin memberikan bantuan jumlah mereka berkurang. Hal ini disebabkan karena mereka ada yang melanjutkan perjalanan ke tempat lainnya, karena mereka ini berpindah-pindah. Tentunya ini menjadi tantangan bagi kami AWPF karena bantuan ini tidak tersalurkan sesuai dengan target awal kami”*<sup>75</sup>

Sementara berdasarkan hasil wawancara dengan Geubrina Rezeky, staff advokasi Flower Aceh, mengatakan bahwa:

*“Flower Aceh tidak sering turun langsung ke lapangan di camp penampungan pengungsi. Karena pada dasarnya mandat dari Flower Aceh ini sendiri untuk mengurus pengungsi itu tidak ada. Kami dari Flower Aceh tidak terlibat secara khusus, tetapi hanya terlibat secara umum saja. Melalui prinsip kemanusiaan dan bekerjasama dengan organisasi lainnya*

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Syafridah SP, selaku Staf Manager Program Aceh Women’s For Peace Fondation (AWPF) Aceh. Pada Tanggal 29 November 2024.

*juga dalam membantu sesama. Sehingga hambatan yang kami dapatkan itu hampir tidak ada”.*<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa ketidakuratan data terkait jumlah pengungsi setiap harinya yang berpindah-pindah dari suatu tempat penampungan ke tempat penampungan lainnya sehingga setiap harinya bertambah atau berkurang membuat organisasi perempuan seperti AWPF terhambat dalam memberikan bantuan kepada pengungsi khususnya kepada perempuan dan anak sehingga tidak tersalurkan dengan baik sesuai target awal.

## 2. Fasilitas kesehatan untuk pengungsi

Pasca terjadinya konflik di Negeranya, banyak pengungsi yang datang ke Aceh dalam kondisi yang membutuhkan fasilitas kesehatan. Kondisi pengungsi Rohingya sangat memprihatinkan akibat trauma yang dialami, sering menghadapi banyak hambatan dalam mengakses layanan kesehatan di kamp pengungsian, yang disebabkan oleh kelalaian pemerintah setempat dalam memberikan bantuan. Sehingga berdampak pada kesehatan pengungsi perempuan dan anak. Organisasi perempuan di Aceh telah menegaskan pentingnya akses perempuan dan anak-anak terhadap layanan kesehatan yang memadai. Ini melibatkan penyediaan fasilitas kesehatan yang ramah perempuan dan anak serta pelayanan yang mencakup pemantauan kesehatan mental.

Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi organisasi perempuan dalam merespons krisis pengungsi Rohingya. Hal ini disampaikan oleh Ibu Irmasari, SH.i selaku direktur AWPF, mengatakan bahwa:

*“Penyakit yang didapati pada pengungsi Rohingya itu adalah penyakit kulit dan lambung. Hal ini karena para pengungsi menempati penampungan yang belum layak. Terus karena mereka tinggal ramai-ramai, jadi tidak bisa dipungkiri masalah kulit pasti bakalan terjadi. Banyak anak-anak yang mengalami gatal-gatal. Sehingga kami*

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Geubrina Rezeky, Selaku Staf Advokasi Pemberdayaan Masyarakat Flower Aceh (FA). Pada Tanggal 20 November 2024.

*mengharapkan adanya fasilitas kesehatan yang ramah bagi perempuan dan anak apalagi bagi ibu hamil”.*<sup>77</sup>

Organisasi Perempuan lainnya di Aceh juga telah menyampaikan pernyataan sikap terkait permasalahan kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh, hal itu disampaikan oleh pimpinan organisasi-organisasi perempuan di Aceh, yang terdiri dari Balai Syura Ureung Inong Aceh BSUIA, Flower Aceh (FA), Serikat Inong Aceh (SeIA), Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan Aceh, Yayasan Pulih Aceh, Aceh Women's for Peace Foundation (AWPF), LBH Apik Aceh, Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK), Komisi Kesetaraan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Sekolah HAM Perempuan Flower Aceh, dan Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MiSPI). Dalam pernyataan sikap tersebut, mereka menekankan pentingnya akses perempuan dan anak-anak terhadap layanan kesehatan yang memadai. Ini melibatkan penyediaan fasilitas kesehatan yang ramah perempuan dan anak, serta pelayanan yang mencakup pemantauan kesehatan mental.

#### **4.4.2 Penolakan Masyarakat**

Salah satu tantangan besar dari organisasi perempuan Aceh, dalam merespons krisis pengungsi Rohingya adalah karena adanya penolakan dari masyarakat setempat. Penolakan dari masyarakat kepada pengungsi Rohingya terjadi karena munculnya kekhawatiran dari masyarakat yang menimbulkan dampak negatif dari pengungsi karena adanya gangguan keamanan, kesehatan dan lingkungan yang menyebabkan masyarakat tidak suka akan sikap pengungsi Rohingya yang tidak menghormati dan menghargai masyarakat Aceh.

Salah satu masyarakat Banda Aceh, Syifa Maisarah mengatakan bahwa: *“Perasaan saya, ketika kedatangan awal pengungsi Rohingya ke Aceh sangat kasian. Namun akhir-akhir ini karena beredarnya informasi yang mengatakan kejelakan terhadap pengungsi Rohingya seperti membuang bantuan yang sudah diberikan ke laut, membuat keributan,*

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Irmasari SH.i, selaku Direktur Aceh Women's For Peace Fondation (AWPF), Pada Tanggal 29 November 2024.



*kabur dari tempat penampungan. kita sebagai masyarakat Aceh jadi ilfeel dengan sikap mereka, hingga rasa simpati itu hilang. Tanggapan saya terkait peran organisasi perempuan di Aceh yang merespon kedatangan pengungsi Rohingnya, saya melihat organisasi ini telah berpartisipasi dalam memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingnya. Seperti yang saya lihat di Balai Meuseraya, banyak organisasi perempuan yang turun langsung dalam menangani mereka. Hal ini disebabkan karena adanya penolakan dari masyarakat”.*<sup>78</sup>

Organisasi perempuan Aceh sangat menyesalkan aksi pengusiran terhadap pengungsi Rohingnya. Sebagaimana ibu Syafridah SP, staf AWPf divisi program, mengatakan bahwa:

*“Kita menyesalkan ketika teman-teman yang mengaku dirinya sebagai mahasiswa, melakukan intimidasi, kekerasan yang menimbulkan trauma kepada pengungsi, terutama kepada kelompok rentan, anak dan perempuan. Mereka gagal paham soal sebab musabab orang Rohingnya terdampar ke Aceh, lalu bertindak bagaikan robot-robot kosong etika”.*<sup>79</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Meutya Farida, staf AWPf divisi

administrasi dan keuangan bahwa:

*“Harusnya mahasiswa bisa sedikit jeli dan tidak menelan mentah-mentah informasi bohong tersebut, informasi ini betul-betul membuat pikiran mereka menjadi buntu. Karena sebagai agent of change mereka menjadi penengah bukan malah sebaliknya”.*<sup>80</sup>

Adanya penolakan dari mahasiswa dan masyarakat sekitar akan menjadi hambatan bagi organisasi perempuan dalam memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingnya ini. Hal ini disampaikan oleh Ibu Irmasari, SH.i, Direktur AWPf Aceh yaitu:

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Syifa Maisarah, Selaku Masyarakat Kota Banda Aceh, Pada tanggal 30 November 2024.

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Syafridah SP, selaku Staf Manager Program Aceh Women’s For Peace Fondation (AWPF) Aceh. Pada Tanggal 29 November 2024.

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Meutya Farida, Staf Administrasi dan Keuangan Aceh Women’s For Peace Fondation (AWPF) Pada Tanggal 29 November 2024.



*“saya sangat menyayangkan terhadap aksi penolakan terhadap kedatangan pengungsi Rohingya. Kita merasa bahwa pengungsi ini adalah perempuan yang harus kita manusiakan kita menginginkan mereka mendapatkan hak yang sama seperti kita, seperti hak hidup, hak mendapatkan pengetahuan serta hak mendapatkan pendidikan. Adanya penolakan ini tentunya akan menambah tekanan batin bagi pengungsi rohingya yang sebagian besar didominasi oleh perempuan dan anak. Selain itu juga akan memperlambat bagi kami dalam mendistribusikan bantuan darurat kepada mereka”.*<sup>81</sup>

Kehadiran pengungsi Rohingya di Aceh mendapatkan penolakan dari masyarakat karena mereka menunjukkan sikap yang tidak menghargai masyarakat lokal dengan membuang bantuan yang sudah diberikan ke laut, membuat keributan, kabur dari tempat penampungan. Masyarakat Aceh sudah memiliki sikap berbelas kasihan kepada pengungsi Rohingya dengan memberikan bantuan, tetapi kebaikan dari masyarakat tidak dibalas dengan rasa terimakasih. Hal ini menunjukan bahwa sikap yang dimiliki oleh pengungsi Rohingya tidak memiliki nilai kemanusiaan.

Selain menunjukan sikap yang tidak menghargai, alasan penolakan dari masyarakat Aceh, juga diakibatkan karena kehadiran jumlah pengungsi sudah terlalu banyak sehingga menjadi beban bagi masyarakat Aceh, pemerintah dan juga organisasi perempuan Flower Aceh dan AWPf dalam menyediakan bantuan kemanusiaan dan juga fasilitas. Penolakan dan pengusiran ini membuat kondisi yang sebagian besarnya adalah perempuan dan anak, semakin menderita. Mereka menghadapi diskriminasi yang bertubi-tubi karena tidak memiliki status kewarganegaraan, berada dalam ancaman persekusi, dan sebagian besar menghabiskan hidupnya dalam pelarian dan pengungsian. Perubahan sikap warga Aceh ini, karena pengalaman tidak menyenangkan dari hubungan berinteraksi dengan pengungsi Rohingya selama bertahun-tahun.

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Irmasari SH.i, selaku Direktur Aceh Women’s For Peace Fondation (AWPF), Pada Tanggal 29 November 2024.

#### 4.4.3 Kebijakan Pemerintah yang Kurang Akomodatif

Penerimaan pengungsi Rohingya menjadi isu yang kompleks yang membutuhkan keseimbangan antara kebijakan negara dan solidaritas kemanusiaan. Kehadiran pengungsi Rohingya menjadi kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) tahun 2016 yang memberi ruang bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk bertindak. Kewenangan pemerintah hanya sebatas memberikan tempat penampungan yang bersifat sementara, sedangkan urusan lainnya tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten dan kota sama sekali tidak bisa terlibat aktif dalam menangani persoalan pengungsi yang terus mengundang perdebatan di dalam masyarakat. Hal ini tentunya menjadi suatu tantangan bagi organisasi perempuan di Aceh dalam merespons krisis pengungsi Rohingya di Aceh. Hal ini disampaikan oleh direktur AWPf, Ibu Irmasari SH.i, yaitu:

*“Menurut saya, pemerintah kurang peduli atau kurang pro dan tentunya tidak ada kebijakan-kebijakan yang pro kepada mereka. Dan mereka itu menganggap bahwa itu bukan wilayah dan kewajiban serta tanggung jawab mereka dalam memberikan bantuan ataupun kebijakan. Pemerintah selama ini hanya menyediakan tempat pengungsian sementara saja (camp). Bantuan yang diberikan kepada pengungsi Rohingya selama ini hasil kerja sama dengan beberapa organisasi perempuan Aceh. Padahal Indonesia yang meratifikasi beberapa konvensi tentang HAM, seharusnya mereka harus membantu. Tetapi selama ini ketika pengungsi Rohingya datang ke Aceh, Pemerintah Aceh dengan keterbatasannya hanya memfasilitasi mereka tempat tinggal. Sementara untuk bantuan makanan, kamar mandi semua difasilitasi oleh UNHCR dan beberapa organisasi perempuan yang konsern kepada isu pengungsi”.*<sup>82</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa diperlukan kebijakan dari pemerintah pusat terkait pengungsi Rohingya. Pemerintah Aceh

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Irmasari SH.i, selaku Direktur Aceh Women's For Peace Fondation (AWPF), Pada Tanggal 29 November 2024.

selama ini hanya menyediakan tempat pengungsian sementara saja. Bantuan yang diberikan kepada pengungsi Rohingya selama ini hasil kerja sama dengan beberapa organisasi perempuan Aceh. Karena kehadiran pengungsi Rohingya menjadi kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) tahun 2016 yang memberi ruang bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk bertindak. Namun kewenangan pemerintah daerah hanya sebatas memberikan tempat penampungan yang bersifat sementara, sedangkan urusan lainnya tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal ini menjadi suatu tantangan bagi organisasi perempuan di Aceh

#### **4.4.4 Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

Dalam melaksanakan perannya, organisasi perempuan harus menghadapi tantangan terkait keterbatasan sumber daya yang mereka miliki. Dalam hal ini ada 2 isu utama yaitu :

1. Kurangnya ahli (*expert*) di bidang pengungsi

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi suatu tantangan besar bagi organisasi-organisasi perempuan di Aceh, dalam menangani pengungsi Rohingya. Tantangan ini muncul akibat dari sedikitnya jumlah tenaga kerja yang mempunyai keahlian dalam bidang pengungsi, sehingga menyebabkan gagalnya suatu organisasi perempuan dalam menjalankan tugas dan perannya. Karena keberhasilan manajemen suatu organisasi sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang ada pada organisasi tersebut. Sumber Daya Manusia, merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia artinya manusia yang memiliki daya, kemampuan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam setiap pelaksanaan kegiatan organisasi, sehingga akan terwujud kinerja sebagaimana yang diharapkan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Geubrina Rezeky, selaku staf advokasi dari divisi pemberdayaan masyarakat, Flower Aceh (FA) yaitu:

*“Flower Aceh kita masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), karena dari Flower Aceh sendiri yang konsern dalam bidang refuge dan paham tentang masalah penanganan pengungsi Rohingya hanya saya*

*satu orang yaitu saya sendiri. Karena staf lainnya mereka mempunyai kegiatan tersendiri di programnya masing-masing. Tetapi kadang-kadang ketika tim lain turun lapangan dan mengajak, saya juga gabisa terlibat. Karena kembali<sup>83</sup> lagi kepada prinsip awal, Flower Aceh tidak mempunyai mandat secara khusus untuk isu refuge”.*<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam menangani permasalahan terkait kedatangan pengungsi Rohingya, Flower Aceh masih kekurangan Sumber Daya Manusia yang konsen dalam bidang pengungsi dan paham tentang masalah penanganan pengungsi Rohingya. Hal ini tentunya akan menjadi tantangan bagi Flower Aceh dalam berpartisipasi membantu pengungsi.

## 2. Beban domestik

Beban domestik atau beban ganda, adalah suatu beban pekerjaan yang diterima oleh jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya.

Dalam menanggapi permasalahan pengungsi, organisasi perempuan seperti Flower Aceh sering mengalami beban domestik atau peran ganda, disaat ingin membantu pengungsi Rohingya. Beban domestik ini sering dihadapi oleh staf khususnya perempuan, dimana mereka sering kali mendapatkan pekerjaan yang lebih ketika di rumah dibandingkan ditempat kerjanya. Hal ini dialami oleh Organisasi perempuan Flower Aceh. Hal ini disampaikan oleh Ibu Siti Almuntarina, Staf pemberdayaan, divisi koordinasi lapangan Flower Aceh yaitu:

*Dalam melaksanakan tugasnya, tiap staf Flower memiliki tingkat kemampuan berbeda-beda dalam mengatur pekerjaannya. Ada yang pembagian peran domestic sudah terbagi maka dalam pekerjaan dan mendapat dukungan dari suami dan keluarga, ada juga staf yang masih bernegosiasi dan meyakinkan keluarga tentang pekerjaan di LSM. Situasi ini membuat beberapa staf masih harus mengurus anak pada saat jam kerja, mereka yang memiliki anak kecil harus menjemput anak*

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Geubrina Rezeky, Selaku Staf Advokasi Pemberdayaan Masyarakat Flower Aceh (FA). Pada Tanggal 20 November 2024.



*pulang sekolah di saat jam kerja, bahkan ketika mendapat tugas keluar kota untuk beberapa hari kerja seperti turun kelapangan kamp pengungsian Rohingya, terpaksa membawa anak karena tidak ada yang menjaganya. Hal ini masih menjadi tantangan bagi aktivis perempuan dalam menjalankan peran kami dalam suatu organisasi, apalagi nilai-nilai budaya yang patriarkhis di Aceh yang meletakkan peran gender untuk urusan domestik menjadi tugas perempuan atau Ibu”.*<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam merespons krisis pengungsi Rohingya, organisasi perempuan menghadapi beberapa tantangan yang memperlambat kegiatannya. hal ini bisa dilihat dari adanya tantangan administratif seperti ketidakakuratan data pengungsi yang menyebabkan distribusi bantuan kepada pengungsi perempuan dan anak tidak tersalurkan sama rata, kemudian fasilitas kesehatan pengungsi, banyak dari pengungsi perempuan dan anak terkena penyakit kulit, sehingga organisasi perempuan harus menyediakan layanan kesehatan yang baik untuk pemenuhan hak-hak pengungsi. Serta adanya tantangan penolakan dari masyarakat, kebijakan pemerintah yang kurang akomodatif, dan keterbatasan sumber daya manusia yang terdiri dari kurangnya ahli dalam bidang pengungsi dan juga beban domestik yang dihadapi perempuan.

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara Dengan Siti Almuntarina, selaku Koordinasi Lapangan Divisi Pemberdayaan Masyarakat Flower Aceh (FA), Pada Tanggal 20 November 2024.



## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan penulis pada bab sebelumnya mengenai “Peran Organisasi Perempuan dalam Merespons Krisis Pengungsi Rohingya di Aceh: Studi Kasus Flower Aceh dan *Aceh Women’s For Peace Aceh Foundation*” maka organisasi perempuan telah menunjukkan sikap, peran dan tantangan dalam merespons krisis pengungsi Rohingya di Aceh, dan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam konteks krisis pengungsi Rohingya di Aceh, kedua organisasi perempuan Flower Aceh dan AWPf telah menunjukkan etika kepedulian (*Ethics of Care*) karena menekankan pentingnya hubungan sosial, empati, dan tanggung jawab kolektif dalam merespons krisis kemanusiaan. Mereka yang terlibat langsung dalam membantu pengungsi Rohingya, didasarkan pada etika kepedulian yang mereka miliki. mereka tidak hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga secara emosional menunjukkan empati kepada pengungsi yang ditunjukkan melalui sikap-sikap seperti, Moralitas kepedulian yang bersumber dari etika kemanusiaan khas perempuan, mandat lembaga, pengalaman konflik GAM dan Tsunami Aceh, nilai-nilai keagamaan, serta adat dan tradisi. Organisasi perempuan juga menunjukkan sikap yang kosen terhadap kondisi perempuan dan anak yang terlihat dari kosen mereka mengenai kondisi penampungan yang tidak layak, perempuan dan anak yang menjadi korban TPPO, serta adanya keprihatinan mereka akan penyebaran hoaks dan penolakan masyarakat.
2. Dalam merespons krisis pengungsi Rohingya di Aceh, kedua organisasi ini telah berperan dalam upaya turut serta mendistribusikan bantuan kemanusiaan, melakukan pendataan kebutuhan pengungsi, memberikan edukasi kepada masyarakat dan pengungsi Rohingya, serta melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Peran yang telah dilakukan ini telah mendukung dengan teori etika kepedulian feminis yang dikemukakan oleh Carol Gilligan.

3. Dalam merespons krisis pengungsi Rohingya di Aceh, tentunya organisasi perempuan di Aceh menghadapi berbagai macam tantangan diantaranya tantangan administrasi yang terdiri dari dua aspek yaitu ketidakakuratan data pengungsi yang menghambat organisasi perempuan AWPF dalam mendistribusikan bantuan dan minimnya fasilitas kesehatan yang memadai untuk pengungsi. Tantangan selanjutnya yaitu berupa penolakan dari masyarakat, kebijakan pemerintah yang kurang akomodatif, dan keterbatasan sumber daya manusia dari internal organisasi perempuan yang memiliki keahlian di bidang pengungsi juga dihadapkan oleh beban domestik yang harus mereka emban.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan yang telah diuraikan penulis pada bab sebelumnya, maka penulis ingin memberikan saran kepada berbagai pihak terkait dengan harapan untuk menjawab tantangan yang ada dengan harapan untuk ditindaklanjuti.

1. Dalam menyikapi tantangan administratif yang dialami oleh organisasi perempuan dalam merespons krisis pengungsi, kami berharap agar pemerintah dapat membuat alur administrasi data yang lebih integratif yang bisa di akses dengan baik, sehingga dapat mengatasi tantangan yang dihadapi oleh organisasi perempuan selama ini.
2. Dalam menyikapi tantangan berupa penolakan dari masyarakat terhadap pengungsi Rohingya, kami berharap organisasi perempuan dapat melakukan edukasi kepada masyarakat serta kalaborasi dan kerjasama dengan kampus untuk mengajak masyarakat mengetahui kondisi pengungsi yang sebenarnya.
3. Dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang kurang akomodatif, diharapkan pemerintah perlu lebih memperhatikan dan menerima masukan dari masyarakat dan organisasi perempuan mengenai bagaimana penanganan pengungsi dengan baik untuk kedepannya.

4. Dalam menyikapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia yang menjadi beban domestik bagi organisasi perempuan, kami berharap organisasi perempuan khususnya Flower Aceh dapat meningkatkan kapasitas dari anggota organisasi yang ahli dibidang pengungsi dengan meningkatkan pemahaman anggota organisasi tentang isu pengungsi, dan juga melakukan pelatihan dan sosialisasi bagaimana menyampaikan bahwa peran yang mereka mainkan di tengah masyarakat sama pentingnya dengan peran mereka di rumah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sayuti."Analisis Framing Pemberitahuan Isu Rohingya Di Media CNN dan AJJN" . *Jurnal Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*.
- Alliya Nurfitriya, Faqesysha Nabilla Irvi dkk., Mengatasi Gender-Based Violence: pendekatan UNHCR di kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh". *Jurnal ilmu pendidikan, politik dan Sosial Indonesia*, universitas veteran jakarta. Vol.1 no.3 juli 2024.
- Arif Fhalda. "Dinamika Penanganan Pengungsi Rohingya Oleh Lembaga Internasional Studi Kasus UNHCR Dan IOM Di Lhoksemawe Tahun 2020-2022". *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Pemerintah Uin Ar-Raniry Banda Aceh, thn 2023.*"
- Budi Budaya, M.Pd, S.H. "Dampak kewarganegaraan etnis Rohingya di Myanmar terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan negara sekitar". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang*. Vol.11,No.1, Mei 2017 hal 106-120.
- Caraka Prabu:"Pengungsi Rohingya Dan Potensi Konflik Dan Kemajemukan Horizontal Di Aceh" *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani*. Vol.No.2 Hal 87 Desember ( 2023)
- Carrol G, in a Difrent Voice. Psychological Theory and Women's Development (Cambridge: Harverd University,2013)'hlm.62.
- Chairussani Abbas, Sopamena. *Pengungsi Rohingya dan Potensi Konflik & Kemajemukan Horizontal Di Aceh*.
- Eri Barlian. 2016, *Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press.
- Farida Haryani,"*Di Balik Nestapa Pengungsi Rohingya.*" Dalam Buku Duka Pengungsi Rohinya: Catatan Kum Stateless People Mnyamar. Hlm 27-29.
- Farida Nugrahani. 2014, *Metode Penelitian Kualitatif* Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia, Surakarta.



- Haidari Khansa. 2024. Penolakan Pengungsi Rohingya Di Aceh: Peran Moral Foundation Terhadap Sikap Penolakan Masyarakat Aceh. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.11, No.1.
- Hardi Alunaza S.D. “ Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritizedasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015. *Skripsi Universitas Tanjungpura*. Vol,2 No.1 januari-juni 2017. Hal. 1.
- Hastanti Widy Nugroho, “ Paradoks Gender Kajian Feminisme Etis” *Jurnal Filsafat* Vol,18,Nomor 3, Desember 2008. Hlm 305.
- Heri Aryanto,Rohingya: *Sejarah, Penderitaan, Dan Kedatangannya Di Indonesia*. Hlm.56.
- Khoirunnisa Mi’rojiah. 2012. *Ethics of Care* dalam Pendidikan: Sebuah Analisa Filosofis atas Pemikiran Nel Noddings. Hal.45.
- Kukuh Setyo Pambudi, Metodologi Penelitian Studi Kasus Fenomenologi. *Jurnal Sains Psikologi Universitas Malang*, No.1, Maret 2017, hlm, 23-25.
- Muhammad Ichsan, Aksara *Jurnal Pendidikan non formal*, valume 07(02) Mei 2021, Universitas Indonesia.
- Nabila Ainiyah, Debora Neira (2021),“Peran Indonesia Dalam Membantu Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya” *Skripsi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional* , Universitas Paramadina jakarta selatan.
- Zainuddin Akbar Bahrin, “Etika Memuliakan Tamu Dalam Surat Al-Dzariyat Ayat 24-33 Menurut Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Dzilal Al-Quran, *Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2017)
- Rulan Ahmadi. 2016. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Saiful, Melly Masni. Dalam buku “ *Duka Pengungsi Rohingya Catatan Kaum Stateless People Myanmar*”.
- Salim dan Syahrudin. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Konsep dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan.

Septiana Dwiputri Maharani, Konsep Etika Kepedulian Carol Gillingan Dalam Persepektif Filsafat Manusia dan Relevansinya bagi Pemahaman Hubungan Antargender Di Indonesia, *Skripsi*. Universitas Gadjah Mada, 2015.

Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan Tindakan*. (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm,22.

Wagiman, Hukum pengungsi internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.52.

### **Website**

<https://Eprints.Uny.Ac.Id/22882/4/BAB%20II.Pdf>

<https://Id.Scribd.Com/Document/403150006>.” Konsep Etika Kepedulian Carol Gillingan Dalam Persepektif Filsafat Manusia Relevansinya”.

<https://id.scribd.com/document/562705556/> Tahapan perkembang Moral Carol-Gilligan.

<https://Study.Com/Academy/Lesson/Carol-Gilligans-Theory-Of-Moral-Development.Html>.

[https://Www.Detik.Com/Sumut/Berita/D-7074619/4-Kelakukan-Buruk-Pengungsi-Rohingya Aceh-Buang-Bantuan-Kabur-Dari-Kamp](https://Www.Detik.Com/Sumut/Berita/D-7074619/4-Kelakukan-Buruk-Pengungsi-Rohingya-Aceh-Buang-Bantuan-Kabur-Dari-Kamp).

<https://Regional.Kompas.Com/Read/2024/03/22/074745678/Tolak-Pengungsi>.

<https://liks.suara.com/read/2024/11/11/172150/di-balik-jeruji-truk-kisah-pilu-pengungsi-rohingya-yang-ditolak-di-Aceh>.

<https://Iainlangsa.Ac.Id> “Dosen IAIN Langsa Sampaikan Respon Masyarakat Aceh Terhadap Pengungsi Rohingya.”

<https://Aceh.Tribunnews.Com>.”11 Organisasi Perempuan Aceh Sesalkan Pengusiran Pengungsi Rohingya Oleh Mahasiswa.”

<https://arpus.acehprov.go.id>. “Peluncuran Buku Aceh Muliakan Rohingya”.

<https://theconversation.com/ditolak-di-berbagai-tempat-mengapa-pengungsi-rohingya-diterima-dengan-tangan-terbuka-di-aceh-145033>.

[https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/05/150518\\_Nelayan Aceh PetuhPerintah TNI Terkait Pengungsi indonesia](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150518_Nelayan_Aceh_PetuhPerintah_TNI_Terkait_Pengungsi_indonesia).

<https://nu.or.id/nasional/antropolog-uin-ar-raniry-pertolongan-darurat-harus-diutamakan-untuk-pengungsi-rohingya-5dtJA>

## LAMPIRAN 1

### Tujuan Flower Aceh

Mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, ada dalam pola relasi perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, menghargai keberagaman, menolak diskriminasi dan anti kekerasan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Flower Aceh melakukan usaha-usahan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan perempuan agar memiliki kekuasaan politik yaitu akses dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan terutama yang menyangkut kehidupan perempuan. Selain itu, kekuatan sosial yaitu akses dan partisipasi didalam pengelolaan sumber daya (ekonomi dan kehidupan). Demikian pula rasa aman dari tekanan dan pengaruh kekuatan-kekuatan budaya patriakhi dan kekuasaan negara.
2. Melakukan pembelaan (*advocacy*) terhadap perempuan korban tindak kekerasan negara baik dalam bentuk diskriminasi politik, sosial ekonomi, budaya maupun hukum di Aceh serta mengupayakan perubahan kebijakan pemerintahan agar membela hak-hak dan kepentingan perempuan.
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan Flower Aceh sehingga berkembang menjadi organisasi yang mampu mengelola sumber daya staf, keuangan dan meningkatkan manajemen serta kinerjanya untuk mewujudkan tujuan-tujuan strategis program secara transparan.

## LAMPIRAN 2

### Tugas, Fungsi dan kegiatan utama Flower Aceh

1. Memperkuat dan mendorong perwujudan hak-hak dasar perempuan marginal dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial budaya.
2. Memperkuat partisipasi perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di daerahnya.
3. Mengembangkan pendidikan dan pelatihan-pelatihan untuk memperkuat kepemimpinan perempuan.
4. Mengembangkan database kasus kekerasan terhadap perempuan dan database lain terkait kelembagaan

5. Melakukan advokasi kebijakan untuk pemenuhan hak-hak perempuan
6. Memperkuat kapasitas organisasi dan kelembagaan Flower Aceh.
7. Bekerjasama dengan organisasi perempuan dan lembaga lain yang strategis mulai tingkat lokal, nasional dan internasional untuk memajukan, membela dan meningkatkan kesadaran hak asasi perempuan.

Kemudian dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Flower Aceh berpegang pada sejumlah nilai-nilai dasar sebagai berikut:

a. Nilai Demokrasi

Setiap proses-proses pengambilan keputusan organisasi dibangun secara partisipatif. Keputusan-keputusan yang dilakukan tersebut dilakukan dalam upayanya Flower Aceh berkontribusi untuk memperkuat gerakan penegakan hak-hak perempuan.

b. Nilai Kekerasan dan Diskriminasi

Menolak dan melakukan segala upaya penghapusan terhadap bentuk dan tindakan kekerasan dan deskriminasi terhadap perempuan

c. Nilai Kesetaraan

Adanya keseimbangan antara pola relasi perempuan dan laki-laki.

d. Nilai Keadilan

Pemberlakuan sifat adil, dalam lingkungan internal dan eksternal organisasi, sisi internal pelakuan yang diberikan oleh lembaga tidak memihak dan tidak membedakan anatara staf dan anggota, sisi eksternal selalu bersikap adil terhadap masyarakat dengan tidak membedakan seseorang berdasarkan jenis kelamin, suku, ras dan agama.

e. Nilai Menghargai Keragaman

Selalu menghargai perbedaan yang ada pada setiap orang dengan tidak memandang baik suku, ras, agama, bangsa, ideologi, budaya bahkan pilihan politiknya.





Dalam kelembagaan, Flower Aceh memiliki tiga devisi untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi, diantaranya sebagai berikut :

1. Divisi pemberdayaan Masyarakat

Divisi ini melakukan penguatan untuk masyarakat basis melalui pengorganisasian seperti adanya pertemuan kelompok, memberikan pendidikan kritis agar masyarakat dapat mampu menentukan sikap serta pilihan-pilihan yang terbaik untuk mereka.

2. Divisi Kajian, Pendidikan dan Publikasi

Divisi kajian dan pendidikan mempunyai 2 bagian yaitu bagian indok (informasi dan dokumentasi) dan bagian kampanye. Pada bagian indok mendistribusikan informasi-informasi mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan melalui penerbitan newsletter, buku serta informasi melalui email dan juga membuat database lembaga serta pengelolaan pustaka. Bagian kampanye melakukan investigasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan melakukan advokasi melalui jalur non-litigasi serta melakukan kajian-kajian kebijakan serta diskusi mengenai persoalan perempuan.

3. Divisi Pengembangan, Keuangan dan Lembaga

Dalam upaya penguatan kapasitas kelembagaan melakukan rancangan pengembangan kualitas SDM staf melalui magang serta pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan.

#### LAMPIRAN 4

#### Tujuan, Visi, Misi Dan Bidang Program

Berangkat dari latar belakang pendirian AWPf diatas, maka rumusan tujuan AWPf yakni, *“Mewujudkan kelompok perempuan akar rumput yang kuat di daerah pasca konflik, agar secara berkelanjutan, mampu menciptakan dan menjaga kehidupan yang nir-kekerasan, sejahtera dan berkeadilan sebagai wujud inisiasi damai dari perempuan untuk semua”*. Adapun derivasi daripada tujuan diatas, dirumuskan dalam visi dan misi organisasi sebagai berikut:

### **Visi AWPF**

Terciptanya perdamaian dalam kehidupan sosial yang bersandar pada terselenggaranya kesetaraan gender dan penegakan Hak Asasi Perempuan.

### **Misi AWPF**

1. Membangun komunitas perempuan yang memiliki kapasitas dan kemandirian untuk mendedikasikan diri dalam mewujudkan perdamaian dan pembelaan hak-hak dasar perempuan
2. Membantu proses pembelaan hukum atas berbagai kasus-kasus pelanggaran hak-hak dasar perempuan.
3. Mendorong kebijakan untuk memastikan keadilan gender dan tegaknya hak-hak dasar perempuan
4. Mempromosikan Penegakan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan (Hak Ekonomi, Sosial, Budaya maupun Hak Sipil-Politik).
5. Memperkuat dan membangun Jejaring Sosial Masyarakat Sipil, khususnya kelompok perempuan di tingkat local, regional maupun Internasional.

### **LAMPIRAN 5**

#### **Lingkup Isu Dan Prinsip Dasar Organisasi**

##### **Lingkup Issue yang dihadapi:**

1. Kekerasan terhadap perempuan;
  - Resolusi Konflik dan Perdamaian
  - Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan
2. Ketidakadilan Gender dan Pemiskinan Perempuan
  - Promosi dan Penegakan Hak Sipil dan Politik Perempuan
  - Promosi dan Penegakan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Perempuan
  - Akses perempuan terhadap Keadilan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

#### **Prinsip Dasar Organisasi dan Hubungan Fungsional**

##### **Prinsip Dasar Organisasi:**

- a. Demokratis
- b. Anti Kekerasan

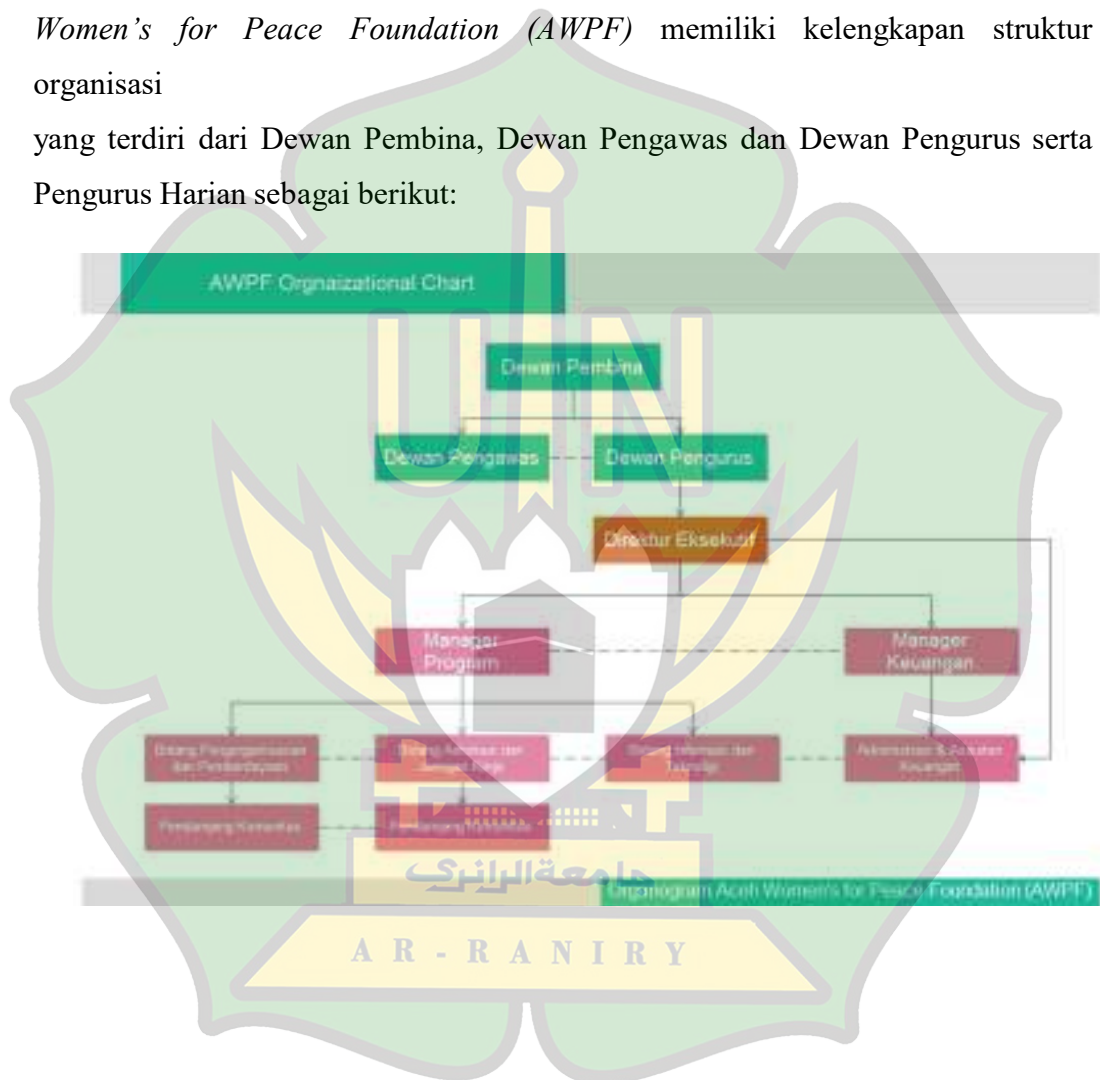
c. Setara dan Berkeadilan Gender

## LAMPIRAN 6

### Tentang Susunan Organisasi

Sebagai sebuah organisasi yang berbadan hukum sebagai Yayasan, *Aceh Women's for Peace Foundation (AWPF)* memiliki kelengkapan struktur organisasi

yang terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus serta Pengurus Harian sebagai berikut:





## LAMPIRAN 7 : SK PEMBIMBING



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 423/Un.08/FISIP/Ep.07.6/02/2024**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN**  
**ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian sarjana mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 status UIN Ar-Raniry Banda Aceh ;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;  
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
11. Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Nomor PEM-00/PS/2007 tentang Pelaksanaan Pengalihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);  
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423025/2024, Tanggal 24 November 2023.

**Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal 08 Februari 2024

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

**KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :

1. Prof. Dr. Phil. Saiful Akmal, M.A. Sebagai pembimbing I
2. Nelly Maani, M.L.R. Sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi :

Nama : Pathya Adlina  
NIM : 190801065  
Program Studi : Ilmu Politik  
Judul : Peran Organisasi Perempuan Dalam Merespon Krisis Pengungsi Rohingya Di Aceh. Studi Kasus Flower Aceh (FA) Dan Aceh Women's For Peace Foundation (AWPF)

**KEDUA** : Segala pemisahan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibatalkan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ditemukan hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

**DITETAPKAN DI : BANDA ACEH**  
**PADA TANGGAL : 21 FEBRUARI 2024**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN**  
**ILMU PEMERINTAHAN,**



**Tersusun :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Politik;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

## LAMPIRAN 8 : SURAT PENELITIAN

	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN</b> Jalan Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon: 0851-7552921, 7551857; Fax: 0851-7552922 Website: <a href="http://www.fkip.uin-ar-raniry.ac.id">www.fkip.uin-ar-raniry.ac.id</a> e-mail: <a href="mailto:fkip@ar-raniry.ac.id">fkip@ar-raniry.ac.id</a>	
Nomor	: B-29/Un.08/FISIP/PP.00.9/01/2025	07 Januari 2025
Lamp.	: -	
Hal	: Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa	
Yth.	1. Aceh Women's For Peace Foundation (AWPF) 2. Flower Aceh (FA)	
di-		
Tempat		
Assalamu'alaikum Wr. Wb.		
Berkenaan dengan penyusunan Skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, untuk itu kami mohon izin mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini untuk melakukan penelitian dan pengambilan data, adapun nama mahasiswa tersebut sebagai berikut:		
Nama	: Fathiyah Addini	
Nim	: 190801065	
Prodi/Semester	: Ilmu Politik / XI	
No.Hp	: 082160955754	
Alamat	: Indrapuri, Aceh Besar	
Judul Skripsi	: Peran Organisasi Perempuan dalam Merespons Krisis Pengungsi Rohingya Di Aceh. Studi Kasus Flower Aceh (FA) Dan Women's For Peace Foundation (AWPF)	
Pembimbing I	: Prof. Dr. Philp . Saiful Akmal, M.A.	
Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.		
 A R - R A N I R Y Dekan		
 Muji Muliaz		
<i>Energi Kelangkaan Sinergi Membangun Negeri</i>		
  		
98   Page		

## LAMPIRAN 9

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### DATA DIRI

Nama : Fathiya Addini  
Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Besar, 1 Juli 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/190801065  
Fakultas Prodi : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan/Ilmu Politik  
Alamat : Indrapuri, Aceh Besar

#### RIWAYAT PENDIDIKAN

TK : TKIT Al-Furqan  
SD/MIN : MIN 23 Aceh Besar  
SMP/MTS : MTsN 1 Model Banda Aceh  
SMA/MA : SMAN 8 Banda Aceh  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

#### DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Anwar  
Nama Ibu : Putri Suryani  
Pekerjaan Ayah : Pensiunan  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)  
Alamat : Indrapuri Aceh Besar

Banda Aceh, 6 Januari 2025

Yang menerangkan

Fathiya Addini

## **LAMPIRAN 10 :**

### **Istrument Penelitian Wawancara Dengan Organisasi Perempuan Flower Aceh Dan Aceh Women's For Peace Foundation**

#### **Informan : Organisasi Perempuan**

#### **Sikap Organisasi Perempuan dalam Merespons Krisis Pengungsi Rohingya di Aceh**

1. Bagaimana organisasi Anda memandang krisis pengungsi Rohingya di Aceh?
2. Apa yang memotivasi organisasi untuk terlibat dalam merespons krisis ini?
3. Bagaimana perasaan Anda dan anggota organisasi terhadap kondisi pengungsi, terutama perempuan dan anak-anak?
4. Apakah ada prinsip moral atau nilai tertentu yang menjadi panduan dalam merespons krisis ini?
5. Bagaimana Anda memaknai "kepedulian" dalam konteks membantu pengungsi Rohingya?
6. Bagaimana Anda menilai sikap masyarakat Aceh secara umum terhadap pengungsi Rohingya, dan bagaimana organisasi Anda mempengaruhi atau bekerja sama dengan masyarakat?

#### **Peran Organisasi Perempuan dalam Memberikan Bantuan dan Perlindungan bagi Pengungsi Rohingya di Aceh**

1. Apa peran utama organisasi Anda dalam memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya?
2. Bagaimana organisasi Anda memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan pengungsi, terutama perempuan dan anak-anak?
3. Apakah organisasi Anda menyediakan dukungan emosional dan psikologis bagi para pengungsi? Jika ya, bagaimana prosesnya?



4. Apakah Anda pernah menghadapi situasi di mana Anda harus memilih antara berbagai kebutuhan pengungsi? Bagaimana Anda menentukan prioritas?
5. Bagaimana Anda mendukung hak-hak perempuan dan anak di kalangan pengungsi Rohingya?

### **Tantangan yang Dihadapi oleh Organisasi Perempuan dalam Merespons Krisis Pengungsi Rohingya di Aceh**

1. Apa tantangan terbesar yang dihadapi organisasi Anda dalam merespons krisis pengungsi Rohingya di Aceh?
2. Apakah ada kendala dalam hal logistik, pendanaan, atau sumber daya manusia? Jika ya, bagaimana Anda mengatasinya?
3. Bagaimana kebijakan pemerintah setempat memengaruhi upaya organisasi Anda dalam memberikan bantuan kepada pengungsi?
4. Apakah Anda mengalami resistensi atau ketidaksetujuan dari masyarakat lokal terkait kegiatan organisasi Anda? Jika ya, bagaimana organisasi merespons? Bagaimana Anda menilai dukungan dari lembaga-lembaga internasional atau non-pemerintah lainnya dalam membantu menangani pengungsi?
5. Bagaimana Anda menilai dukungan dari lembaga-lembaga internasional atau non-pemerintah lainnya dalam membantu menangani pengungsi?

### **Informan : Masyarakat**

### **Sikap Organisasi Perempuan dalam Merespons Krisis Pengungsi Rohingya di Aceh**

1. Bagaimana perasaan Anda terkait dengan kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh?
2. Apakah Anda merasa memiliki tanggung jawab moral atau sosial untuk membantu para pengungsi?
3. Apakah Anda pernah terlibat secara langsung dalam membantu pengungsi Rohingya di wilayah ini? Jika ya, bagaimana peran Anda?
4. Bagaimana Anda melihat peran organisasi perempuan dalam membantu pengungsi Rohingya di daerah Anda?



5. Menurut Anda, apa yang membuat masyarakat Aceh merespons krisis pengungsi dengan kepedulian di awal kedatangan pengungsi, dan apakah sikap ini berubah seiring waktu?

#### **Peran Organisasi Perempuan dalam Memberikan Bantuan dan Perlindungan bagi Pengungsi Rohingya di Aceh**

1. Bagaimana menurut Anda peran organisasi perempuan, seperti Balai Syura Ureng Inong Aceh dan Komunitas Perempuan Peduli Aceh (KaPPAh), dalam memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya?
2. Apakah Anda pernah menyaksikan langsung kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perempuan ini? Jika ya, kegiatan apa yang paling berkesan bagi Anda?
3. Bagaimana pandangan Anda terhadap upaya organisasi perempuan dalam melindungi perempuan dan anak-anak di antara para pengungsi?
4. Apakah Anda merasa organisasi perempuan memberikan pendekatan yang berbeda dibandingkan organisasi lainnya dalam membantu pengungsi? Jika ya, bagaimana?

#### **Tantangan yang Dihadapi oleh Organisasi Perempuan dalam Merespons Krisis Pengungsi Rohingya di Aceh**

1. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam membantu pengungsi Rohingya?
2. Apakah ada perbedaan sikap antara masyarakat dalam hal membantu pengungsi? Jika ada, bagaimana perbedaannya?
3. Apakah Anda merasa terbatas dalam memberikan bantuan, misalnya karena kurangnya dukungan dari pemerintah atau organisasi lain?
4. Bagaimana perubahan sikap masyarakat terhadap pengungsi, terutama setelah insiden atau masalah yang pernah terjadi?
5. Apa pandangan Anda tentang tantangan yang dihadapi oleh organisasi perempuan dalam menjalankan program bantuan dan perlindungan bagi pengungsi di sini?

## LAMPIRAN 11: DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara bersama Ibu Geubrina Rezeky, selaku Staf Advokasi Pemberdayaan Masyarakat Flower Aceh (FA)



Wawancara bersama Ibu Siti Almuntarina, selaku koordinasi Lapangan Divisi Pemberdayaan Masyarakat Flower Aceh (FA)



Wawancara bersama Ibu Irmasari SH,i. Direktur *Aceh women's For Peace Foundation* (AWPF)



Wawancara bersama Ibu Meutya Farida, Staf Administrasi dan keuangan *Aceh Womens For Peace Foundation* (AWPF)



Wawancara bersama Ibu Syafridah SP, Staf Program *Aceh Womens For Peace Foundation* (AWPF)



Wawancara bersama Yasmin dan Syifa Maisarah selaku Masyarakat Kota Banda

